



BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM



20
22

BALAI BESAR POM DI SEMARANG



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan YME, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Balai Besar POM di Semarang dapat senantiasa hadir dalam memberikan pelayanan prima dan melindungi masyarakat Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja TW IV yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada TW IV. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM.

Balai Besar POM di Semarang telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di wilayah Jawa Tengah dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan mendukung peningkatan daya saing pangsa pasar produk unggulan Jawa Tengah. Peningkatan kinerja tersebut tercermin melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Adanya perubahan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 kami jadikan sebagai tantangan yang mampu memicu pencapaian kinerja yang lebih baik.

Laporan Kinerja Interim TW IV Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan pada triwulan berikutnya, dalam upaya mewujudkan secara nyata tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang sebagai institusi pengawas Obat dan Makanan di wilayah kerja Jawa Tengah.

Semarang, 20 Januari 2023
Kepala BBPOM di Semarang



Dra. Sandra M.P. Linthin, Apt., M.Kes.

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022

BBPOM di Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja diukur dari 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada TW IV Tahun 2022 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada TW IV Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 1 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sebelas Sasaran Kegiatan yang diukur pada TW IV Tahun 2022

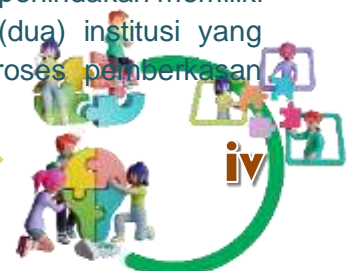
No	Perspektif	Sasaran Strategis	NPSS	NP Perspektif
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	96,45	100,81
2		Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	101,09	
3		Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	104,89	
4	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	105,92	107,14
5		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	102,64	
6		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	100,00	
7		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	122,00	
8	Learning and Growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	105,92	104,01
9		Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	101,55	
10		Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	111,55	
11		Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	97,02	
			NPS	103,99
			Kriteria	Memenuhi Ekspektasi



Dari hasil NPS sebesar 103,99% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, terjadi peningkatan 1,54 poin dari TW III meski naik tetapi selama 2022 masih ditemukan cukup banyak produk obat (Kosmetik) dan Pangan fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Untuk hasil Ketiga Nilai Pencapaian Perspektif telah memenuhi ekspektasi semua dengan nilai capaian di atas 100%. Lebih mendetail lagi Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 96,45% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang belum berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada Triwulan IV tahun 2022
2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kedua sebesar 101,09% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan BBPOM di Semarang berhasil Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Semarang
3. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Ketiga sebesar 104,89% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang
4. Capaian indikator Sasaran Kegiatan keempat sebesar 105,92% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan BBPOM di Semarang berhasil dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 102,64% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, BBPOM di Semarang berhasil dalam meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
6. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
7. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 122,00% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, hal ini dikarenakan Substansi penindakan memiliki strategi koordinasi lebih dini dan intens terhadap 2 (dua) institusi yang berperan penting untuk keberhasilan penyelesaian proses pemberkasan



(proses P21 dan Tahap II). Kedua institusi ini yaitu Kejaksaan Tinggi dan Dit. Reskrimsus Polda Jateng. Namun, untuk proses P21 pada berkas terakhir, yaitu KMD, mendapatkan P21 lebih cepat.

8. Capaian indikator Sasaran kegiatan kedelapan sebesar 105,92% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan BBPOM di Semarang mewujudkan tatakelola pemerintahan yang optimal
9. Capaian indikator Sasaran kegiatan kedelapan sebesar 101,55% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan BBPOM di Semarang mewujudkan SDM yang berkinerja optimal
10. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesepuluh sebesar 113.87% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan BBPOM di Semarang telah berhasil meningkatkan penguatan laboratorium, pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
11. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesebelas sebesar 97,02% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan BBPOM di Semarang belum berhasil dalam mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW III Tahun 2022, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 56.702.377.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan setelah ada automatic adjustment dan relokasi anggaran KIE ke BBPOM di Bandung pada bulan Mei 2022 maka jumlah anggaran BBPOM di Semarang pada TW II sebesar Rp. 55.272.377.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada Bulan Agustus untuk pemenuhan kebutuhan belanja Pegawai sampai dengan akhir tahun dengan pembukaan Automatic Adjustmen Sebesar Rp 672.850.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Penambahan Sebesar Rp1.089.218.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Sembilan juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), dan adanya penambahan Anggaran KIE pada Bulan September Sebesar Rp. 540.720.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), serta pengurangan Automatic Adjustmen sebesar Rp. 3.693.272.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). Maka pagu dipa menjadi Rp. 52.668.323.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Pada TW IV tahun 2022 terealisasikan sebesar Rp 52.603.755.839,- (Lima Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau 99,88% telah mencapai target 90%.

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022

BBPOM di Semarang



DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	11
Bab II Perencanaan Kinerja	25
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	25
2.2 Perjanjian Kinerja 2022.....	25
2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	27
Bab III Akuntabilitas Kinerja	30
3.1 Capaian Kinerja Triwulan (TW) IV.....	30
3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan IV	32
3.2.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	32
IKK 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	32
IKK 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	35
IKK 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	38
IKK 1.4 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu	40
IKK 1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	44
3.2.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	46
IKK 2.1 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	47
3.2.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	50
IKK 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian	



bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	51
IKK 3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	58
IKK.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	59
3.2.4 Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	61
IKK.4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	62
IKK.4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64
IKK.4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.....	67
IKK.4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	69
IKK.4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
IKK.4.6 Indeks Pelayanan Publik.....	74
IKK.4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81
3.2.5 Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang	85
IKK.5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86
IKK.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	89
IKK.5.3 Jumlah Desa Pangan Aman	93
IKK.5.4 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	102
3.2.6 Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang	106
IKK.6.1 Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	107
IKK.6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.....	111
3.2.7 Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Semarang	114
IKK.7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	115
3.2.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	118



IKK.8.1 Indeks RB BBPOM di Semarang	118
IKK.8.2 Nilai AKIP BBPOM di Semarang	120
3.2.9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	122
IKK. 9.1 Indeks Profesionalitas ASN	122
3.2.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	125
IKK.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	125
IKK.10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG yang optimal	127
3.2.11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	129
IKK.11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	130
3.3 Realisasi anggaran	133
3.4 Efisiensi Penggunaan Anggaran	135
Bab IV Penutup	138
41 Kesimpulan	138
42 Saran	141
Lampiran	142



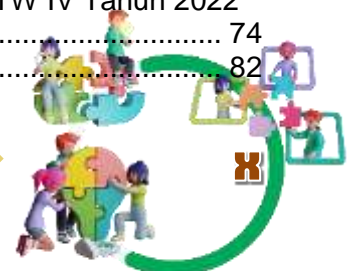
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang	11
Gambar 2 Profil Pegawai BBPOM di Semarang.....	15
Gambar 3 Peta Pembagian wilayah kerja Pengawasan obat dan makanan di Jawa Tengah.....	17
Gambar 4 Data Sarana Produksi di wilayah BBPOM di Semarang	18
Gambar 5 Data Sarana Distribusi di wilayah BBPOM di Semarang.....	18
Gambar 6 Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	22
Gambar 7 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)	28
Gambar 8 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK1	32
Gambar 9 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK2	47
Gambar 10 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK3	50
Gambar 11 Aspek pengukuran dalam survei Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM.....	52
Gambar 12 Nilai SKM 2022 di SAPA APIP BPOM (Per Desember 2022).....	60
Gambar 13 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4	62
Gambar 14 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5	86
Gambar 15 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK6	107
Gambar 16 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK7	114
Gambar 17 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK8	118
Gambar 18 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK9	122
Gambar 19 Hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN	124
Gambar 20 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK10	125
Gambar 21 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK11	129
Gambar 22 Nilai IKPA di Omspan	131
Gambar 23 Nilai EKA di Smart DJA	132



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sebelas Sasaran Kegiatan yang di ukur pada TW IV Tahun 2022.....	iii
Tabel 2 Perubahan Strategi Balai Besar POM di Semarang 2020-2024	12
Tabel 3 Kebutuhan SDM BBPOM di Semarang Berdasarkan ABK Tahun 2022	14
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang	25
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 BBPOM di Semarang	27
Tabel 6 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang TW IV 2022	31
Tabel 7 Nilai Pencapaian Sasaran SK 1	32
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat TW IV 2022.....	33
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	35
Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW IV Tahun2022	38
Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW IV 2022	41
Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan TW IV 2022.....	44
Tabel 13 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2	46
Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness Index).....	49
Tabel 15 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3	50
Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TW IV	53
Tabel 17 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan TW IV Tahun 2022.....	53
Tabel 18 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan TW IV Tahun 2022.....	58
Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM TW IV 2022	59
Tabel 20 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK	61
Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW IV	62
Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan TW IV 2022.....	65
Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	67
Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW IV Tahun 2022.....	69
Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW IV 2022	72
Tabel 26 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	74
Tabel 27 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik TW IV Tahun 2022	74
Tabel 28 Tahapan Pendampingan UMKM	82



Tabel 29 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW IV 2022.....	83
Tabel 30 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5	85
Tabel 31 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan TW IV	86
Tabel 32 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman TW IV 2022.....	89
Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman TW IV 2022 ...	97
Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas TW IV 2022	104
Tabel 35 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6	106
Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW IV 2022	107
Tabel 37 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW IV 2022.....	111
Tabel 38 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7	114
Tabel 39 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW IV 2022	116
Tabel 40 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8	118
Tabel 41 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB BBPOM di Semarang TW IV ...	119
Tabel 42 Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja.....	121
Tabel 43 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP BBPOM di Semarang TW IV ...	121
Tabel 44 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9	122
Tabel 45 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang.....	123
Tabel 46 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10	125
Tabel 47 Capaian Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi TW IV 2022.....	127
Tabel 48 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11	129
Tabel 49 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	130
Tabel 50 Realisasi Anggaran TW IV Tahun 2022	134
Tabel 51 Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja TW IV Tahun 2022	136
Tabel 52 Pengukuran Efisiensi per Kelompok Rincian Output (KRO) TW IV Tahun 2022	137
Tabel 53 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sebelas Sasaran Kegiatan yang di ukur pada TW IV Tahun 2022.....	138



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Kerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang
- Lampiran 4. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022

BBPOM di Semarang



Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era *Society 5.0* menjadi tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Semarang pada tahun 2022. Sinergisme antara pengawasan *pre* dan *post market* sangat diperlukan untuk mendukung arah kebijakan Badan POM. Kebijakan pengawasan termasuk isu strategis yang diidentifikasi, perlu dikawal oleh unit kerja BBPOM di Semarang. Dan dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, BBPOM di Semarang mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja BBPOM di Semarang merupakan bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328,

7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, Website www.pom.go.id



1.2.1 Fungsi

Mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang seperti pada Gambar 1.1. Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Bagan Organisasi BBPOM di Semarang sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
 - e. Pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
 - f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

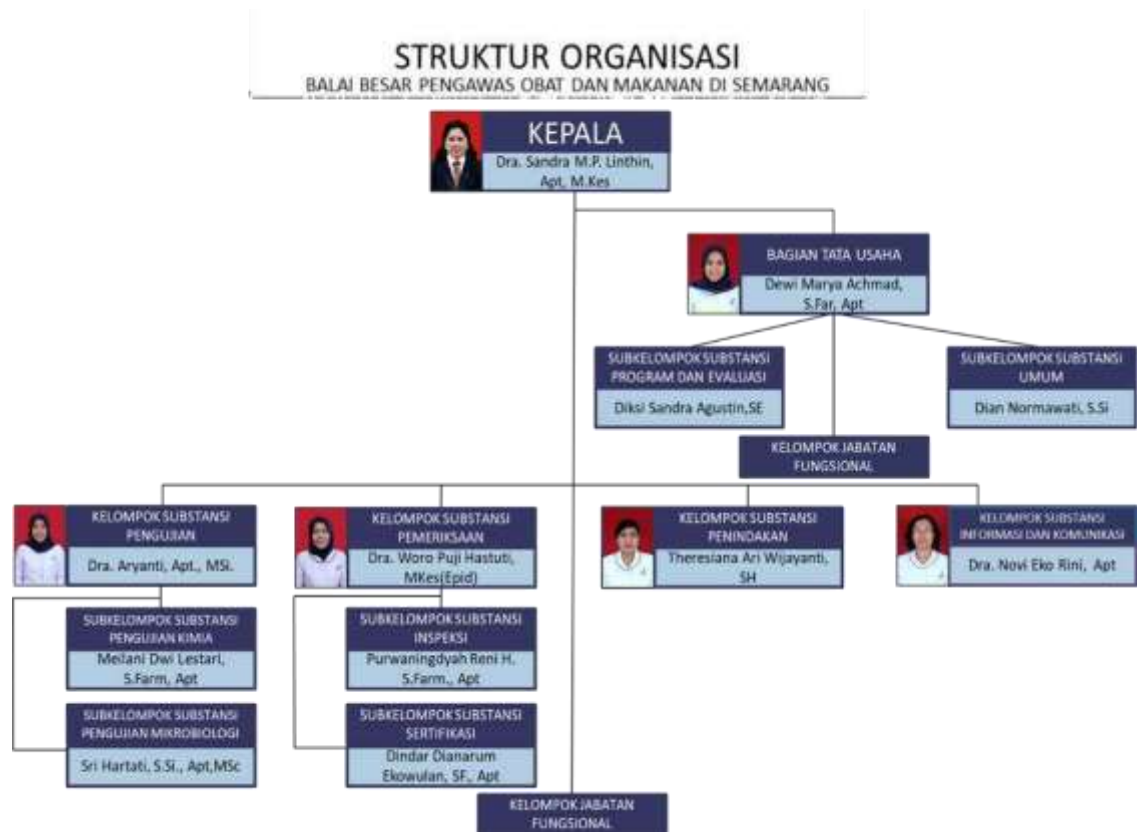
Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.



Gambar 1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Semarang

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

BBPOM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre- marketing* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa



datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
3. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang

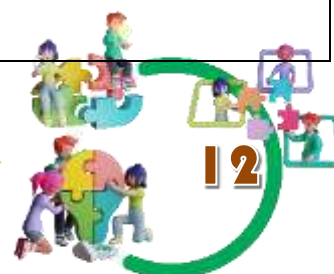
Selain itu Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi Balai Besar POM di Semarang, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urut strategi Balai Besar POM di Semarang sesuai dengan perubahan tata urut Arah Kebijakan Balai Besar POM di Semarang.

Secara rinci, perubahan Strategi Balai Besar POM di Semarang Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2 Perubahan Strategi Balai Besar POM di Semarang 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM Balai Besar POM di Semarang berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha



Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
4. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Semarang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung lintas sektor terkait meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi.

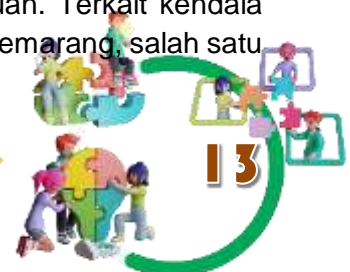
1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

1.4.2.1 Internal

Balai Besar POM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh :

a) Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BBPOM di Semarang 2020-2024, BBPOM di Semarang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan ABK dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai dibutuhkan pegawai sebanyak 232 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja mengacu Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi BBPOM di Semarang memandang perlu menambah jumlah SDM dengan jenis kepegawaian PPPK sehingga dapat memberikan ruang bagi SDM profesional untuk menjadi bagian dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih baik. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Semarang telah mengajukan usulan kebutuhan PPPK sejumlah 17 formasi dengan sebaran jabatan antara lain Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata Komputer, Perencana, serta Arsiparis. Untuk saat ini jumlah SDM Balai Besar POM di Semarang per 24 Desember 2021 adalah 146 orang dengan persentase 20% laki-laki serta 80% perempuan. Terkait kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SDM Balai Besar POM di Semarang, salah satu



yang menjadi isu utama adalah upaya meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN yang pada tahun 2022 memperoleh angka 85,79. Terkait hal tersebut, Balai Besar POM di Semarang berupaya melakukan pemetaan pegawai yang masih memiliki potensi untuk dilakukan peningkatan kompetensi melalui peningkatan Pendidikan. Saat ini Balai Besar POM di Semarang masih memiliki 32 orang pegawai dengan Pendidikan di bawah S1, atau secara persentase 21% dari keseluruhan pegawai.

Tabel 3 Kebutuhan SDM BBPOM di Semarang Berdasarkan ABK Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah SDM berdasar		Jumlah SDM berdasar ABK		Gap	
		ABK	Orang	Bezzeting	Orang		
1	Bidang Pengujian	82	Orang	55	Orang	27	Orang
2	Bidang Pemeriksaan	65	Orang	37	Orang	28	Orang
3	Bidang Penindakan	13	Orang	11	Orang	2	Orang
4	Bidang Infokom	23	Orang	15	Orang	8	Orang
5	Bagian Tata Usaha	49	Orang	27	Orang	22	Orang
Total		232	Orang	145	Orang	87	Orang



b) Anggaran

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2022 : Rp. 52.668.323.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan : Rp. 52.603.755.839,- 31 Desember 2022

Persentase realisasi anggaran sebesar 99,88 % dari alokasi anggaran Tahun 2022.

Peranan BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, BBPOM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 sebesar : Rp. 2.651.776.000,-.

Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan BBPOM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

1.4.2.2 Eksternal

Wilayah kerja BBPOM di Semarang adalah 26 Kab/Kota di propinsi Jawa Tengah, mempunyai luas wilayah seluruhnya 32,548 km² atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia. Komposisi luas lahan yang ada, 30,47% lahan sawah, dan 69,53% bukan lahan sawah.

BBPOM di Semarang melakukan pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah.



Wilayah kerja BBPOM di Semarang, meliputi:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Kota Semarang | 10. Kabupaten Semarang | 18. Kabupaten Kudus |
| 2. Kabupaten Grobogan | 11. Kabupaten Batang | 19. Kabupaten Blora |
| 3. Kabupaten Demak | 12. Kabupaten Boyolali | 20. Kota Magelang |
| 4. Kabupaten Kebumen | 13. Kabupaten Purworejo | 21. Kota Pekalongan |
| 5. Kabupaten Klaten | 14. Kabupaten Temanggung | 22. Kota Salatiga |
| 6. Kabupaten Pati | 15. Kabupaten Rembang | 23. Kabupaten Tegal |
| 7. Kabupaten Jepara | 16. Kabupaten Wonosobo | 24. Kota Tegal |
| 8. Kabupaten Kendal | 17. Kabupaten Pekalongan | 25. Kabupaten Brebes |
| 9. Kabupaten Magelang | | 26. Kabupaten Pemalang |



Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas, meliputi:

1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Cilacap
3. Kabupaten Banjarnegara
4. Kabupaten Purbalingga

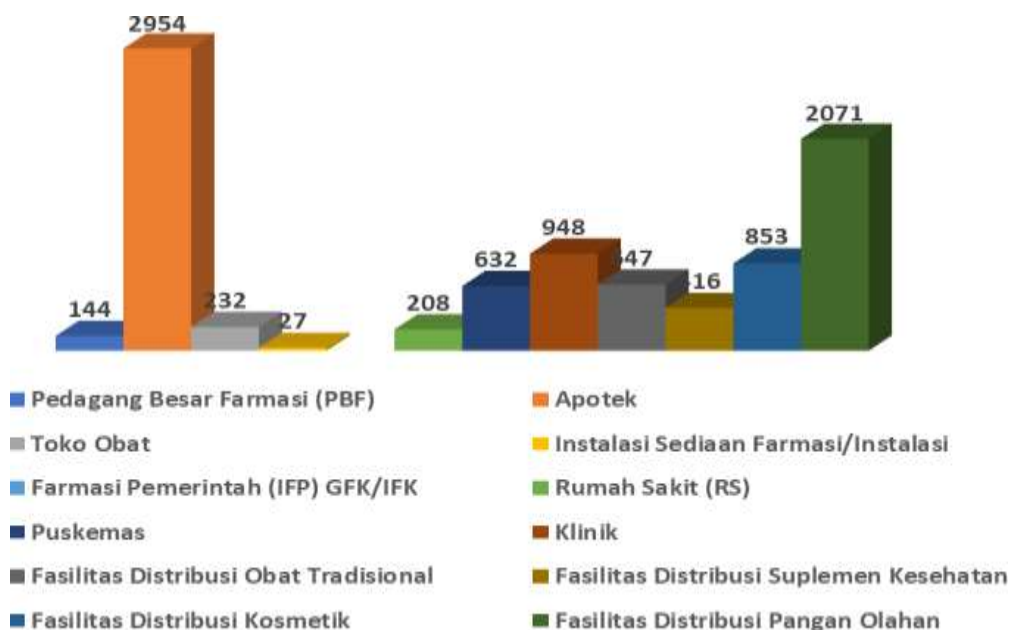
Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta, meliputi:

1. Kota Surakarta
2. Kabupaten Karanganyar
3. Kabupaten Sragen
4. Kabupaten Sukoharjo
5. Kabupaten Wonogiri

Gambar 3 Peta Pembagian wilayah kerja Pengawasan obat dan makanan di Jawa Tengah



Gambar 4 Data Sarana Produksi di wilayah BBPOM di Semarang



Gambar 5 Data Sarana Distribusi di wilayah BBPOM di Semarang

1.4.3 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2022

1.4.3.1 Isu Internal

1. Struktur Organisasi

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BBPOM di Semarang sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan tugas BBPOM di Semarang. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud yaitu perubahan nomenklatur Bidang dan Seksi di Bidang Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi menjadi Koordinator dan

Kelompok Jabatan Fungsional, serta Sub Bagian menjadi Kelompok Jabatan Fungsional, namun tanpa perubahan tugas dan fungsi semula. Selain itu, Loka POM Kota Surakarta dan Loka POM Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 telah menjadi Satuan Kerja (Satker) Mandiri.

2. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2021, jumlah SDM yang dimiliki BPOM untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per 22 April 2021 adalah sejumlah 4.812 orang yang tersebar di Unit Pusat dan UPT di seluruh Indonesia. Berdasarkan kebutuhan dengan perhitungan Beban Kerja Badan POM Tahun 2020-2024 diperoleh angka beban kerja (ABK) sebanyak 10.009 orang pegawai, sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai sebanyak 5.175 orang pada tahun 2021. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, dilakukan analisis beban kerja untuk mengetahui jenis jabatan dan jumlah pegawai yang diperlukan, termasuk gap (kekurangan) pegawai. Pengisian gap tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengisian CPNS, PPPK, mutasi, kenaikan jabatan, dan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) agar jumlah SDM BPOM tersebut memadai secara kompetensi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BPOM perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pegawai dan pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

BPOM telah mengembangkan aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*) yang merupakan platform pengembangan kompetensi digital yang terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id> yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan dimanapun, serta aplikasi SIMPHONI yang merupakan *platform knowledge management* di lingkungan BPOM pegawai atau Unit BPOM untuk *sharing data*, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau Unit lain. Kedua



aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara mandiri.

Kekuatan SDM Balai Besar POM di Semarang per 24 Desember 2021 adalah 146 orang, diantaranya masih terdapat 21% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana. Berdasarkan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan ABK BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024 dibutuhkan pegawai sebanyak 232 orang.

3. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium.

Penerapan *Good Laboratory Practice* (GLP) memiliki konsekuensi terhadap konsistensi dan peningkatan kompetensinya untuk menerapkan “Pedoman Cara Berlaboratorium Yang Baik” dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN). Tujuan asesmen GLP yaitu untuk memastikan apakah penerapan GLP sesuai standar yang telah ditetapkan. Asesmen GLP merupakan salah satu indikator yang berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengujian dalam rangka peningkatan cakupan pengawasan. Parameter asesmen GLP meliputi pemenuhan ruang lingkup, pemenuhan kompetensi dan pemenuhan peralatan laboratorium. Pelaksanaan kegiatan berupa wawancara, pengecekan bukti fisik, dan pengamatan lapangan. Penilaian Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Semarang oleh tim Penilai dari PPPOMN mendapatkan total nilai sebesar 81,2% diatas rata-rata capaian seluruh BB/BPOM yaitu sebesar 74,1%. Sehubungan dengan penerapan program Regionalisasi Laboratorium Tahun 2022, maka perlu dilakukan perencanaan pemenuhan dan intervensi yang harus dilakukan oleh Balai POM maupun unit kerja Pusat.

1.3.2 Isu Eksternal

1. Dukungan UMKM

BBPOM di Semarang terus mendorong peningkatan daya saing UMKM di Jawa Tengah, melalui pembinaan dan pendampingan sertifikasi produk dan fasilitasi gratis pengujian pangan dan obat tradisional dalam rangka registrasi produk.

BBPOM di Semarang bersinergi dengan lintas sektor sesuai amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerjasama kolaborasi dan sinergis, berupaya membantu masyarakat pelaku usaha dalam sertifikasi dan izin edar produk, melalui Inovasi BPOM Simpatik (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Teknologi Informatika) dan inovasi Lakone Sekti (Layanan Komunikasi Efektif, Sertifikasi dan Registrasi) dengan mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

2. Penegakan hukum tindak pidana Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah.

Dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menerapkan tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan peredaran produk obat dan makanan ilegal (tanpa izin edar) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu,



maka BBPOM di Semarang secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengawasan *fullspectrum* mulai *pre market* hingga *post market*. Untuk menekan peredaran obat dan makanan ilegal BBPOM di Semarang memperkuat pengawasan melalui koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor di bidang penegakan hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Bea & Cukai, dll.) guna mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan yang semakin beragam dan kompleks.

3. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPOM termasuk BBPOM di Semarang sebagai salah satu UPT di wilayah Provinsi Jawa Tengah diharapkan peran sertanya dalam mendukung Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”

Kontribusi pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Sampling Obat Tradisional (MESOT).

2) Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”

Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui pengawalan pengembangan dan pendampingan industri obat tradisional spesifik lokal.

3) Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (Health Security)”

Peran BPOM pada area ini khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi Grand Design Penguatan laboratorium BPOM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan termasuk Jejaring Regionalisasi Laboratorium.

4) Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”

Peran BPOM pada area ini melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.





Gambar 6 Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap warga berhak memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan agar Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN terutama obat esensial. Selain itu harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan, bersama pemerintah daerah, TNI/ Polri, dan swasta. Setelah mempersiapkan pelayanan berkualitas tersebut, kita perlu meninjau seluruh aspek antara lain manajemen tata kelola, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, serta pelayanan dan pembiayaan kesehatan. BPOM mempunyai tugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan penetapan Kriteria *Compliance* untuk Pemilihan Obat JKN dan pembentukan Komite Pengkajian Hasil Pengawasan Penyedia Obat JKN. BBPOM di Semarang berupaya mendampingi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing, kepercayaan Industri Farmasi (principal), kepercayaan Regulator, kepercayaan dari Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit dan Klinik), serta mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka perlindungan masyarakat.



4. Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan saat ini masih ditekankan pada kepatuhan pemenuhan *Good Regulatory Practices* yaitu *Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Good Laboratory Practices (GLP)*, dan *Good Clinical Practices (GCP)*. Maka diperlukan upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan dengan dukungan insentif khusus untuk usaha. Di samping itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendaftaran *online* produk Obat dan Makanan di tingkat pusat (BPOM) dan tingkat provinsi (Balai Besar/Balai POM), terutama proses integrasi sistem BPOM dengan OSS, BKPM.

5. Perkembangan Teknologi Informasi

Salah satu hasil perkembangan teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas adalah teknologi *smartphone*. Pemanfaatan *smartphone* dan media elektronik lain salah satunya digunakan untuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan jaringan internet atau dikenal dengan e-commerce. Karakter industri komunikasi yang mencakup jaringan internet ini memungkinkan pelaku usaha untuk bertransaksi dengan siapa saja dan di mana saja. Terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19 saat ini seluruh masyarakat diharuskan untuk berada di rumah sehingga dengan adanya e-commerce ini maka setiap orang tidak perlu bertemu langsung untuk membeli apa yang mereka butuhkan, termasuk di dalamnya adalah obat dan makanan.

Dasar hukum e-commerce di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi lainnya yang mengatur secara khusus tentang transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu/bergizi yang diedarkan secara daring, perlu dilaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring. Kurangnya kesadaran konsumen dalam memastikan produk yang aman dengan membaca keterangan pada label serta rendahnya pengetahuan konsumen terkait izin edar menyebabkan pelaku usaha cenderung mengabaikan ketentuan izin edar dalam memperdagangkan produknya terlebih yang diedarkan secara online. Hal ini dapat dilihat dari intensitas konsumen membaca keterangan yang tercantum pada label produk serta keterangan yang menjadi perhatian konsumen saat membeli produk online.

6. Pangan Aman Goes To Campus (PAGC)

Dalam rangka membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan, Badan POM mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa (Kementerian/Lembaga, Akademisi dan Asosiasi). Salah satu bentuk kemitraan Badan POM dalam membangun SDM Unggul yaitu melakukan pembaharuan MoU Badan POM dengan Kemendikbud Ristek terkait perluasan cakupan ruang lingkup kerjasama. Adapun perluasan cakupan ruang lingkup diantaranya terkait pemberdayaan Komunitas Pendidikan



dalam hal ini civitas akademika di Perguruan Tinggi, khususnya mahasiswa dalam pengawasan pangan olahan. Mahasiswa merupakan komunitas intelektual dan bagian dari masyarakat yang diharapkan kontribusi aktifnya dalam menjaga keamanan pangan.

MoU Badan POM-Kemendikbud Ristek yang telah ditandatangani pada 19 Oktober 2021, telah terimplementasi melalui integrasi program Pangan Aman Goes to Campus dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Pangan Aman Goes to Campus merupakan program pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan dari komunitas mahasiswa yang berbasis SKKNI Bidang Keamanan Pangan, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan dan dapat melakukan fasilitasi keamanan pangan di UMK Pangan Olahan.

Program Pangan Aman Goes to Campus selaras dengan salah satu bentuk pembelajaran pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu magang bersertifikat. Adapun terobosan baru dari program ini adalah mahasiswa yang akan magang kerja di UMK Pangan olahan terlebih dahulu dibekali kompetensi di bidang keamanan pangan sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan industry/UMK Pangan Olahan. Selanjutnya mahasiswa memiliki kesempatan luas untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata dengan memberikan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan dalam Implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik/Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi UMK Pangan Olahan. Program ini telah didesain sedemikian rupa, diantaranya yaitu adanya kurikulum kegiatan yang berisi aktivitas pembelajaran yang disinkronkan dengan capaian pembelajaran di kampus dalam bentuk SKS; materi pembelajaran yang selaras dengan SKKNI Bidang Keamanan Pangan No. 618 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan; adanya mentor kegiatan yang berasal dari Badan POM, UPT Badan POM (Balai Besar/Balai POM dan Loka POM) serta Perguruan Tinggi. Program Pangan Aman Goes to Campus membekali mahasiswa dengan kompetensi yang memiliki hard skill dan soft skill sebagai Fasilitator Keamanan Pangan, sehingga akan menjadikan mahasiswa sebagai lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman dan menjadi pemimpin masa depan yang unggul yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia.



Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

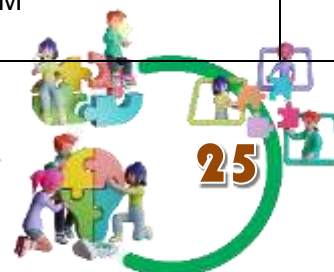
Perencanaan kinerja satuan kerja terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan satuan kerja. Untuk periode tahun 2020-2024, dokumen Renstra Badan POM sudah dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra BBPOM di Semarang tahun 2020-2024.

2.2 Perjanjian Kinerja 2022

Setelah DIPA BBPOM di Semarang Tahun 2022 disahkan, BBPOM di Semarang menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2022 adalah dengan mengacu pada Renja Badan POM Tahun 2022 sesuai aplikasi KRISNA dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2022 yang telah disahkan.

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,4
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,2
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,16
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,2
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Indeks Pelayanan Publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	79
		Jumlah desa pangan aman	28
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	16
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87
		Nilai AKIP UPT	79,5
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,8
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,5



2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

BBPOM di Semarang juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 memuat 12 sasaran kegiatan dengan 27 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2022 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 BBPOM di Semarang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target												Anggaran Per Indikator
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Semarang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	520.920.732,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	239.805.512,40
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	193.844.268,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	115.777.987,60
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	32.967.500,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	124.000.000,00	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM	Indeks kepuasan pelaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,2	63.140.000,00	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,16	193.206.000,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	352.675.000,00	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	529.444.000,00	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	529.444.000,00	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	463.136.000,00	
		Persentase sarana produksi	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	538.374.000,00	
		Persentase sarana distribusi	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	711.820.000,00	
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45	352.675.000,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	13	32	47	52	58	64	71	78	85	89	98	77	150.268.000,00



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target												Anggaran Per Indikator
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	8.781.160.000,00
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	5%	15%	33%	43%	55%	65%	70%	75%	80%	90%	95%	79	947.425.000,00
		Jumlah desa pangan aman	5%	15%	25%	30%	33,3%	41,3%	55%	65,4%	71,4%	83,4%	94,4%	28	1.128.556.000,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6	15	23	31	39	47	56	65	74	82	91	100	714.765.000,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6	15	23	31	39	47	56	65	74	82	91	100	388.551.000,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,5	25	32,5	35	42,5	45	52	60	67,5	70	72	75	1.347.884.000,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar	Indeks RB Balai Besar POM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	43.310.000,00
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,5
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Semarang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,8	498.440.000,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	9.753.658.000,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	-	-	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	137.736.000,00
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Semarang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	-	10	15	53	55	60	65	70	75	80	85	93,5	27.458.350.000,00
Jumlah Anggaran													56.702.377.000,00		

2.4 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	100% ≤ x ≤ 120%	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	x < 80%	Merah	Tidak Efektif

Gambar 7 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS)



Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input(dalam rumus ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$



Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Triwulan (TW) IV

Capaian Kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian Kinerja BBPOM di Semarang TW IV Tahun 2022 diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Tahun 2022. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang /Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) TW IV tahun 2022 sebesar **103,99% (Memenuhi Ekspektasi)**.

Capaian tersebut naik 1,54 poin dari TW III meski naik tetapi selama 2022 masih ditemukan cukup banyak produk obat (Kosmetik) dan Pangan fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Untuk lebih mendetail akan dijelaskan pada subbab berikut.



Tabel 6 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Semarang TW IV 2022

No	Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja			Kriteria	NPSS	NP Perspektif
				Target	Realisasi	%Capaian			
1.	stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	87,23	95,86	Belum Memenuhi Ekspektasi	96,45	100,81
2.			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	92,15	112,38	Memenuhi Ekspektasi		
3.			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,4	77,76	86,98	Belum Memenuhi Ekspektasi		
4.			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	78,66	99,57	Belum Memenuhi Ekspektasi		
5.			Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95	83,09	87,46	Belum Memenuhi Ekspektasi		
6.		Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78	78,85	101,09	Memenuhi Ekspektasi	101,09	
7.		Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,2	94,5	107,14	Memenuhi Ekspektasi	104,89	
8.			Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,16	75,08	104,05	Memenuhi Ekspektasi		
9.			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91	94,18	103,49	Memenuhi Ekspektasi		
10.	internal_process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	100	109,89	Memenuhi Ekspektasi	105,92	107,14
11.			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80	87,66	109,58	Memenuhi Ekspektasi		
12.			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,2	99,68	100,48	Memenuhi Ekspektasi		
13.			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53	54,96	103,7	Memenuhi Ekspektasi		
14.			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71,52	100,73	Memenuhi Ekspektasi		
15.			Indeks Pelayanan Publik UPT	4,45	4,65	104,49	Memenuhi Ekspektasi		
16.		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	86,67	112,56	Memenuhi Ekspektasi	102,64	
17.			Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93	93,38	100,41	Memenuhi Ekspektasi		
18.			Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	79	87	110,13	Memenuhi Ekspektasi		
19.			Jumlah desa pangan aman	28	28	100	Memenuhi Ekspektasi		
20.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	16	16	100	Memenuhi Ekspektasi	100,00		
21.		Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi			
22.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi	120,00		
23.		Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75	91,5	122,00	Tidak Dapat Disimpulkan			
24.	learning_and_growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87	95,85	110,17	Memenuhi Ekspektasi	105,92	104,01
25.			Nilai AKIP UPT	79,5	80,83	101,67	Memenuhi Ekspektasi		
26.		Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,8	85,79	99,99	Belum Memenuhi Ekspektasi	101,55	
27.		Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	86,6	103,1	Memenuhi Ekspektasi	111,55	
28.			Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	3	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan		
29.		Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,5	90,71	97,02	Belum Memenuhi Ekspektasi	97,02	
							NPS	103,99	
							Kriteria	Memenuhi Ekspektasi	

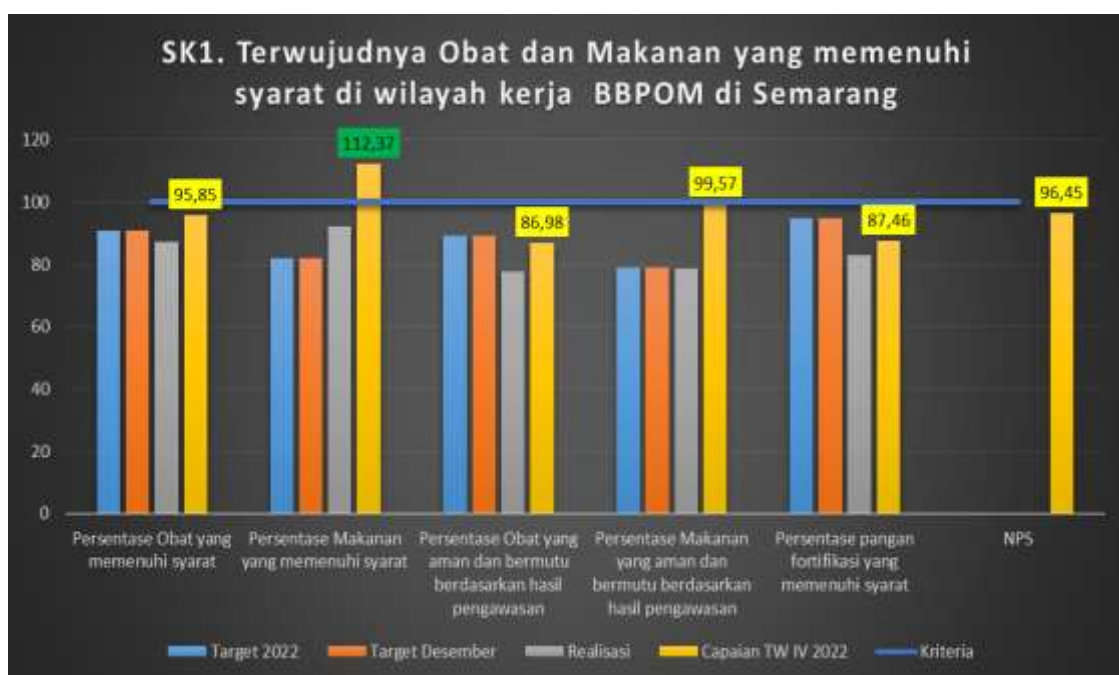


3.2 Analisis Capaian Kinerja Triwulan IV

3.2.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 7 Nilai Pencapaian Sasaran SK 1

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Desember	Realisasi	Capaian TW IV 2022	Kriteria
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	87,23	95,85	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	92,15	112,37	Memenuhi Ekspektasi
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,4	89,4	77,76	86,98	Belum Memenuhi Ekspektasi
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	79	78,66	99,57	Belum Memenuhi Ekspektasi
	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95	95	83,09	87,46	Belum Memenuhi Ekspektasi
NPS					96,45	Belum Memenuhi Ekspektasi



Gambar 8 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK1

IKK 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Realisasi IKK Persentase Obat yang memenuhi syarat yang dilaksanakan pada TW IV mencapai 87,23% jika dibandingkan dengan target 91%, maka capaian sampai dengan TW IV adalah 95,85% (belum memenuhi ekspektasi). Sedangkan bila dibandingkan terhadap target tahun 2022 juga 95,85% (belum memenuhi ekspektasi) karena target tahunan sama dengan target TW IV.



Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat TW IV 2022

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi				Capaian TW IV	Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut			
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	1393	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	1597	87,23	95,85
			Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik					

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Sampai dengan TW IV komoditi obat (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) yang TMS sebesar 12,77%, menurun sebesar 3,09% dibandingkan TW III sehingga **Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada TW IV mengalami kenaikan sebesar 3,39% dibandingkan TW III.**

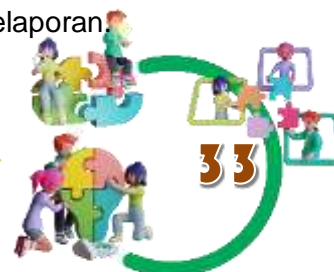
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.

Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi BBPOM di Semarang untuk terus berupaya secara bertahap meminimalkannya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

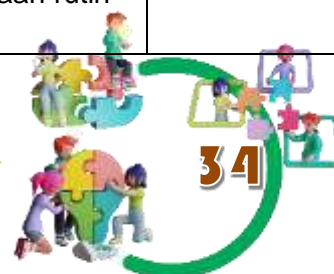
1. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait dan telah dilakukan peninjauan kembali terkait label berdasarkan kategori minor (MK) dan mayor (TMK).
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.



Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			
		Selesai *	Belum**		
			Rencana Aksi	Timeline	
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi, distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan <i>Awareness</i> dan Koordinasi Lintas Sektor Terkait Upaya Pengendalian <i>Antimicrobial Resistance</i> (AMR)		Selesai dilaksanakan tanggal 02 November 2022	
		Pertemuan dan Sosialisasi Pengawasan Produk Sirup Obat yang mengandung Etilen Glikol (EG)/ Dietilen Glikol (DEG) kepada Pelaku Usaha dan Lintas Sektor Terkait		Selesai dilaksanakan tanggal 14 November 2022	
		Farmakovigilans dan Spimker Perkuatan Pengawasan Obat dan Makanan		Selesai dilaksanakan tanggal 14 November 2022	
			Pengawasan peredaran produk sirup obat yang mengandung Etilen Glikol (EG)/ Dietilen Glikol (DEG) secara intensif		Terus menerus
			Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam		Terus menerus



			mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.	
2	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

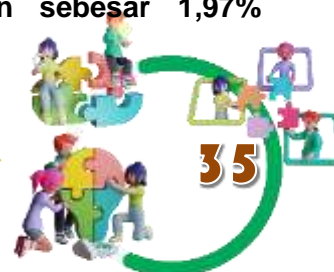
Realisasi IKK Persentase Makanan yang memenuhi syarat yang dilaksanakan pada TW IV mencapai 92,15% jika dibandingkan dengan target 82%, maka capaian sampai dengan TW IV adalah 112,37% (memenuhi ekspektasi). Sedangkan bila dibandingkan terhadap target tahun 2022 juga memenuhi ekspektasi (112,37%) karena target tahunan sama dengan target TW IV.

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase makanan yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi				Capaian TW IV	Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TW IV			
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	657	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	713	92,15	112,37

Sampai dengan TW IV komoditi pangan yang TMS sebesar 7,85%, menurun sebesar 1,62% dibandingkan TW III sehingga **Capaian Persentase Pangan yang memenuhi syarat pada TW IV mengalami kenaikan sebesar 1,97% dibandingkan TW III.**



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/**penurunan** kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman dan berkualitas.

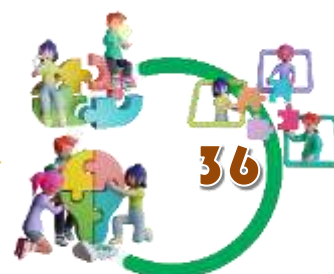
Analisis **program**/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
5. Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi	Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Natal dan Tahun Baru sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran		Selesai dilaksanakan selama bulan Desember 2022



			Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	Terus menerus
2	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA)		Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.	Terus menerus
3	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor		Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.	Terus menerus
			Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.	Terus menerus
4	Koordinasi antara pemeriksaan		Koordinasi antara pemeriksaan dengan	Terus menerus



	dengan pengujian dalam perencanaan sampling		pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	
--	---	--	--	--

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Realisasi IKK Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan pada TW IV mencapai 77,76% jika dibandingkan dengan target 89,40%, maka capaian sampai dengan TW IV adalah 86,98% (belum memenuhi ekspektasi). Sedangkan bila dibandingkan terhadap target tahun 2022 juga 86,98% (belum memenuhi ekspektasi) karena target tahunan sama dengan target TW IV.

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW IV Tahun2022

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW IV Tahun2022

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi				Capaian TW IV	Capaian 2022	
			Pembilang	Penyebut	TW IV				
3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,4	89,4	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	486	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	625	77,76	86,98	86,98

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Sampai dengan TW IV komoditi obat yang TMS sebesar 22,24%, menurun sebesar 5,19% dibandingkan TW III sehingga **Capaian Persentase Obat yang**



aman dan bermutu pada TW IV mengalami kenaikan sebesar 5,81% dibandingkan TW III.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Adanya sampling targeted yang difokuskan pada sampel dengan riwayat TMS dan kasus, sehingga menambah persentase produk TMS.
2. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha produksi dan distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun cara distribusi yang baik.

Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi BBPOM di Semarang untuk terus berupaya secara bertahap meminimalkannya.

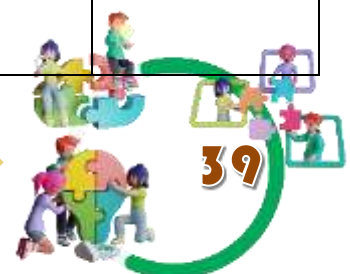
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi, distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Perencanaan sasaran pemeriksaan rutin berdasarkan analisis risiko sehingga produsen dengan riwayat sarana TMK dan riwayat produk TMS menjadi prioritas		Selesai Januari 2022



		pengawasan dan pembinaan		
			Pengawasan peredaran produk sirup obat yang mengandung Etilen Glikol (EG)/ Dietilen Glikol (DEG) secara intensif	Terus menerus
			Pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik termasuk terkait penandaan produk.	Terus menerus
2	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 1.4 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu

Realisasi IKK Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu yang dilaksanakan pada TW IV mencapai 78,66% jika dibandingkan dengan target 79%, maka capaian sampai dengan TW IV adalah 99,57% (belum memenuhi ekspektasi).



Sedangkan bila dibandingkan terhadap target tahun 2022 juga 99,57% (belum memenuhi ekspektasi) karena target tahunan sama dengan target TW IV.

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu” dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW IV 2022

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi				Capaian TW IV	Capaian 2022	
			Pembilang		Penyebut				
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	79	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	188	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	239	78,66	99,57	99,57

Sampai dengan TW IV komoditi pangan yang TMS sebesar 21,34%, menurun sebesar 3,66% dibandingkan TW III sehingga **Capaian Persentase Pangan yang aman dan bermutu pada TW IV mengalami kenaikan sebesar 4,63% dibandingkan TW III.**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Sampel pangan targeted pada TW IV merupakan sampel kasus, sampel UMKM dan targeted rutin.
Sampel targeted yang TMS Sebagian besar merupakan TMK Mayor (14 Sampel), TMS KIO3 (13 sampel), TMS NaCl (5 sampel) dan TMS Benzoat (5 sampel)
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB).
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman dan berkualitas.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan POM serta peraturan terkait,
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.
5. Pelaksanakan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku



usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

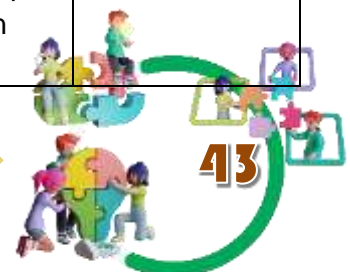
Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah :

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi	Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Natal dan Tahun Baru sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan produk pangan di pasaran		Selesai dilaksanakan selama bulan Desember 2022
			Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	Terus menerus
2	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam		Pendampingan kepada pelaku usaha dalam	Terus menerus



	melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA)		melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.	
3	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor		Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.	Terus menerus
			Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.	Terus menerus
4	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus



Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK 1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Realisasi IKK Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yang dilaksanakan pada TW IV mencapai 83,09% jika dibandingkan dengan target 95%, maka capaian sampai dengan TW IV adalah 87,46% (belum memenuhi ekspektasi). Sedangkan bila dibandingkan terhadap target tahun 2022 juga 87,46% (belum memenuhi ekspektasi) karena target tahunan sama dengan target TW IV.

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan TW IV 2022

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi				Capaian TW IV	Capaian 2022	
			Pembilang		Penyebut				
5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95	95	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	113	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n	136	83,09	87,46	87,46

Sampai dengan TW IV komoditi pangan fortifikasi yang TMS sebesar 16,91%, masih sama dibandingkan dengan TW III karena pada TW IV tidak ada sampling dan pengujian komoditi pangan fortifikasi (Jumlah target sampling dan pengujian sudah terealisasi di TW III)

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

Banyaknya sampel fortifikasi yang TMS terutama TMS kadar yodium dan kadar cemaran logam pada garam konsumsi serta TMS kadar vitamin A pada minyak goreng sawit.

Hal ini dikarenakan :

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha garam konsumsi terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan. Perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait kualitas mutu produk yang dihasilkan. Pembinaan dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait antara lain : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, dll
2. Kewajiban penambahan vitamin A dalam minyak goreng sawit belum diketahui oleh sebagian besar pelaku usaha pada sarana produksi. Perlunya sosialisasi tentang penambahan vitamin A ke pelaku usaha



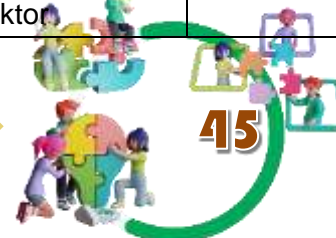
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Sampling fortifikasi sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan analisa risiko,
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah :

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi	Penyelenggaraan Bimtek Fortifikasi Pangan Bagi Pelaku Usaha		Selesai dilaksanakan tanggal 24 November 2022
			Peningkatan pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan rutin kepada sarana produksi dalam implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga pangan yang dihasilkan memenuhi syarat, baik mutu maupun penandaan.	Terus menerus
2	Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA)		Pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap temuan inspeksi melalui penyampaian hasil evaluasi CAPA.	Terus menerus
3	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor		Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor	Terus menerus



			terutama terkait pembinaan kepada pelaku usaha UMKM.	
			Memantau pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah agar memberikan manfaat seoptimal mungkin.	Terus menerus
4	Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling		Koordinasi antara pemeriksaan dengan pengujian dalam perencanaan sampling sampai dengan bulan Desember.	Terus menerus

3.2.2 *Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang*

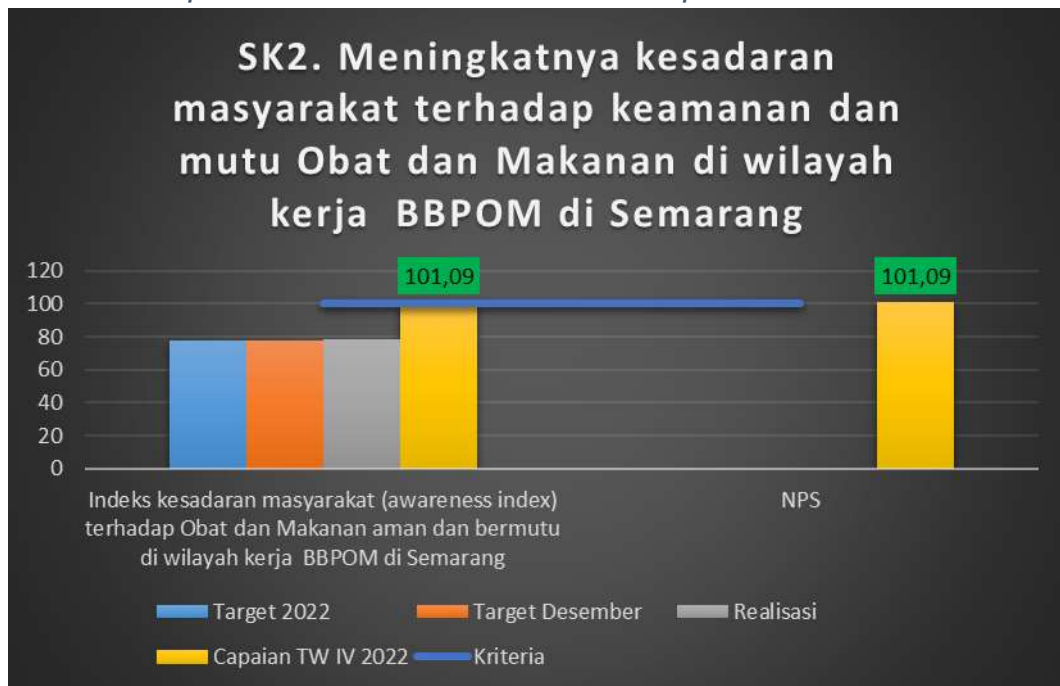
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 13 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Desember	Realisasi	Capaian TW IV 2022	Kriteria
2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang	78	78	78,85	101,09	Memenuhi Ekspektasi
NPS					101,09	Memenuhi Ekspektasi



Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK2



Gambar 9 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK2

IKK 2.1 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Hal ini ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM, kepada kepala/anggota rumah tangga berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan menggunakan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang, terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas, diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2022 sebesar 101,09% dengan kategori MEMENUHI EKSPEKTASI. Berdasarkan interpretasi Indeks Kesadaran realisasi 78,85 termasuk kategori Baik (skala 75,01 – 90,00).



Metode pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif melalui survei dengan cakupan wilayah 34 Propinsi dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online.

Desain Sampling: sampling dua tahap berstrata (stratified random sampling), yaitu: memilih blok sensus secara Probability Proportional to Size (PPS) sampling dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap strata provinsi perkotaan/pedesaan; Memilih sebanyak 10 rumah tangga secara systematic sampling dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga berdasarkan sensus penduduk tahun 2021. Penentuan desain sampling bekerja sama dengan BPS.

Analisis Data: analisis data kuantitatif. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot yang ditetapkan, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Kemudian dalam pengukuran skor indeks total, skala Likert dikonversi ke dalam indeks berskala 0 – 100.

Untuk pencapaian sesuai target, berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang, diantaranya adalah:

1. Mengoptimalkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, melalui berbagai kegiatan baik daring ataupun luring dan pemanfaatan media sosial (instagram, facebook, dll), serta melalui berbagai media informasi baik secara elektronik (TV, radio) maupun non elektronik (spanduk, x-banner, leaflet, permainan, dll)
2. Memberikan informasi cek KLIK dalam setiap kegiatan dengan masyarakat baik secara luring maupun daring, media luar ruang (baliho), dan melalui media elektronik yaitu radio-TV dan media online lainnya.
3. Membuat alat peraga untuk KIE yang lebih beragam misalnya dalam bentuk permainan seperti ular tangga, monopoli, kuartet anak dan kuartet dewasa, dalam bentuk *flip chart*, poster, booklet, banner, permainan, dan leaflet yang dibagikan kepada masyarakat saat melakukan KIE atau kunjungan/pembinaan.
4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Organisasi Masyarakat. Pemberdayaan dilakukan terhadap berbagai organisasi masyarakat diantaranya Aisyiyah, Salimah, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI), dan PKK. Dari masing-masing organisasi masyarakat ini ditunjuk beberapa orang untuk dijadikan kader keamanan pangan dan setiap kader diwajibkan melakukan sosialisasi kembali ilmu yang sudah didapat kepada komunitasnya dan secara mandiri juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat lain di sekitarnya.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komunitas Sekolah dan Komunitas Pasar Melalui Program Keterpaduan Gerakan Keamanan Pangan Desa, Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan Pasar Aman dari Bahan



Berbahaya, sehingga mampu secara mandiri melakukan pengawasan atau memilah dan memilih makanan yang aman.

6. Pemberdayaan komunitas pramuka melalui pelatihan anggota SAKA POM yang selanjutnya mensosialisasikan kembali kepada pramuka lainnya.
7. Menyelenggarakan program pemilihan Duta Kosmetik Jawa Tengah dari masyarakat generasi milenial yang dapat lebih aktif dan kreatif menyampaikan kampanye tentang keamanan obat dan makanan kepada masyarakat.
8. Menyelenggarakan program pembinaan yang intensif dan komprehensif kepada produsen pangan yang masih menggunakan bahan berbahaya pada proses produksinya melalui program inovasi GUMREGAH (Nggugah UMKM Resik Saking Bahan Berbahaya)
9. Inovasi LAYANAN CEKATAN yang merupakan upaya mengedukasi masyarakat sekaligus menurunkan jumlah produk pangan yang mengandung bahan berbahaya yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini penggabungan kegiatan layanan informasi, dan pengujian menggunakan rapid tes kit yang dilaksanakan secara berkala ke sekolah dan pasar tradisional menggunakan mobil laboratorium keliling.
10. Menjalinkan kerjasama kemitraan dengan pemerintah Kabupaten/Kota, asosiasi, pelaku usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti pengawasan terhadap keamanan obat dan makanan.

Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness Index)

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi			Capaian TW IV	Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TW IV		
6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Semarang	78	78	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	78,85	101,09

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Frekuensi, kualitas, dan kuantitas penyelenggaraan KIE kepada komunitas masyarakat terutama masyarakat di wilayah pedesaan terus ditingkatkan dengan membuat materi-materi KIE yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, terkait pengenalan logo obat, petunjuk penyimpanan produk, nomor ijin edar, tanggal kedaluwarsa, ciri-ciri dan efek samping produk yang mengandung bahan berbahaya khususnya pada obat tradisional dan pangan olahan
2. Menyampaikan berita-berita aktual dalam setiap penyelenggaraan kegiatan KIE kepada masyarakat, dan mengunggah di website dan media social.



- Melakukan tindak lanjut atas kerjasama yang telah dijalin serta mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan Obat dan Makanan yang beredar.

3.2.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 15 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Desember	Realisasi	Capaian TW IV 2022	Kriteria
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,2	88,2	94,5	107,14	Memenuhi Ekspektasi
	8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,16	72,16	75,08	104,05	Memenuhi Ekspektasi
	9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91	91	94,18	103,5	Memenuhi Ekspektasi
NPS					104,90	Memenuhi Ekspektasi



Gambar 10 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK3



IKK 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Visi BPOM adalah Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan visi tersebut, BPOM menetapkan berbagai indikator, diantaranya adalah Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha ini dapat mempengaruhi indeks lain karena kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan berpengaruh pada pemahaman pelaku usaha atas regulasi BPOM yang kemudian berdampak pada kepatuhan mereka. Keberhasilan BPOM dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perlu diukur dan dievaluasi sehingga BPOM dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan khususnya terkait kepuasan pelaku usaha.

Indikator “Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan” dihitung secara tahunan. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran melalui survei secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan BPOM adalah bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (regulatory assistance) yang mencakup desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian yang menerima bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Metodologi pengukuran dalam kuesioner Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap bimbingan dan pembinaan BPOM menggunakan kerangka teori Customer Satisfaction dan konsep Service Quality (ServQual) meliputi aspek reliability, assurance, responsiveness, empathy, dan tangible. Konsep SERVQUAL juga sejalan dengan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100. Penghitungan indeks dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi. Pembobotan jenis kegiatan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) sehingga bobot yang digunakan menjadi lebih ilmiah. Bobot yang diperoleh yaitu pendampingan 0,326, desk 0,303, bimtek 0,260, dan sosialisasi 0,110.



Aspek pengukuran dalam survei ini meliputi:



Gambar 11 Aspek pengukuran dalam survei Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM

Periode survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang dilaksanakan mulai 3 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 dengan melibatkan responden yang terlibat dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan pelaku usaha komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan.

Pada TW IV tahun 2022, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang sebesar 94,50, terdiri dari 36 kegiatan yang melibatkan 773 responden. Jika dibandingkan dengan target tahunan (88,2), maka nilai tersebut telah melampaui target tahunan dengan capaian sampai dengan TW IV adalah 107,14% sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif). Namun BBPOM di Semarang akan terus berusaha mempertahankan, bahkan meningkatkan persentase Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di tahun 2023.

Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dari pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TW IV

Indikator	Target TWIV	Target 2022	Realisasi				Capaian TWIV	Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TWIV			
7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,2	88,2	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	94,5	107,14	107,14

Rincian kegiatan sampai dengan TW III 2022 sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di wilayah kerja BBPOM di Semarang sampai dengan TW IV Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
1	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW I	Luring	2022-01-03 s.d 2022-03- 31	3	98,3
2	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penyelesaian CAPA PSB dan Registrasi Produk Pangan Olahan dan BTP -TW I	Luring dan Daring	2022-01-03 s.d 2022-03- 31	1	100
3	Pendampingan / Pendampingan terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPKB dan Notifikasi Kosmetik - TW I	Luring dan Daring	2022-01-03 s.d 2022-03- 31	2	96,92
4	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB/CPOTB Bertahap dan Registrasi Obat Tradisional - TW I	Luring dan Daring	2022-01-03 s.d 2022-03- 31	1	100



5	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Bimbingan Teknis Aspek CPOTB The Series (Series I Pengenalan Denah dan Higiene Sanitasi)	Daring	2022-01-19 s.d 2022-01- 19	31	92,14
---	---	--------	-------------------------------	----	-------

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
6	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Bimbingan Teknis Aspek CPOTB The Series (Series II Dokumentasi dan Sekilas tentang ASROT)	Daring	2022-01-26 s.d 2022-01- 26	30	92,14
7	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Obat Tradisional - TW I	Luring	2022-01-03 s.d 2022-03- 31	6	98,59
8	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Kosmetik - TWI	Luring	2022-01-03 s.d 2022-03- 31	2	100
9	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM di Semarang : Pengenalan Denah dan Perizinan Sarana Kosmetik	Daring	2022-02-17 s.d 2022-02- 17	27	92,15
10	Sosialisasi / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BBPOM di Semarang	Luring dan Daring	2022-03-22 s.d 2022-03- 23	88	91,17
11	Desk / Pelayanan Prima Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar di Semarang	Luring dan Daring	2022-03-29 s.d 2022-03- 31	23	94,66
12	Desk / Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetika di Semarang	Luring	2022-03-29 s.d 2022-03- 31	19	95,14



13	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang: Bimbingan Teknis Pendampingan CPPOB UMKM 2022	Daring	2022-03-04 s.d 2022-03- 04	7	88,8
14	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW II	Luring	2022-04-01 s.d 2022-06-30	5	92,52

No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
15	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha dalam Rangka Penyelesaian CAPA PSB dan Registrasi Produk Pangan Olahan dan BTP -TW II	Luring dan Daring	2022-04-01 s.d 2022-06-30	6	88,07
16	Pendampingan / Pendampingan terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPKB dan Notifikasi Kosmetik - TW II	Luring dan Daring	2022-04-01 s.d 2022-06-30	3	96,83
17	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB/CPOTB Bertahap dan Registrasi Obat Tradisional - TW II	Luring dan Daring	2022-04-01 s.d 2022-06-30	5	99,64
18	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Obat Tradisional - TW II	Luring	2022-04-01 s.d 2022-06-30	3	99,41
19	Desk / Desk/ Konsultasi terkait Sertifikasi CDOB	Luring	2022-04-01 s.d 2022-06-30	3	99,41

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022

BBPOM di Semarang



20	Pendampingan / Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CDOB - TW II	Luring dan Daring	2022-04-01 s.d 2022-06-30	9	94,41
21	Pendampingan / Pelayanan Prima Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Luring	2022-06-21 s.d 2022-06-21	34	96,21
22	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Bimbingan Teknis Sistem Ketertelusuran dan Penyusunan SSOP Produksi Pangan Pendampingan Pangan UMKM 2022	Daring	2022-06-06 s.d 2022-06-06	12	93,15
No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
23	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW III	Luring	2022-07-01 s.d 2022-09-30	6	94,19
24	Desk / Desk/ Konsultasi terkait Sertifikasi CDOB - TW III	Luring	2022-07-01 s.d 2022-09-30	2	100
25	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis dan Desk Konsultasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Luring	2022-07-19 s.d 2022-07-19	32	89,77
26	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM di Semarang : Aspek CPKB Higiene Sanitasi dan Dokumentasi	Daring	2022-07-22 s.d 2022-07-22	38	90,07
27	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis dan Desk Konsultasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Luring	2022-08-16 s.d 2022-08-16	28	93,46
28	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis Perizinan Obat Tradisional dan Pengenalan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	Luring	2022-09-06 s.d 2022-09-06	17	92,18
29	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng BBPOM Semarang : Review CPOTB	Daring	2022-09-30 s.d 2022-09-30	17	86,65

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022

BBPOM di Semarang



30	Bimbingan Teknis / Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang : Label Pangan Olahan	Daring	2022-09-21 s.d 2022-09-21	32	89,33
31	Sosialisasi / Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan kolaborasi dengan BBPOM di Semarang (2)	Luring	2022-10-18 s.d 2022-10-19	15	95,16
32	Desk / Desk/Konsultasi Pelayanan Ekspor Impor, Registrasi, dan Sertifikasi Pangan Olahan - TW IV	Luring	2022-10-01 s.d 2022-12-31	8	94,50
33	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis CPPOB dan Desk Konsultasi Pendaftaran E-Reg	Luring	2022-10-13 s.d 2022-10-13	36	92,25
34	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis dan Desk Konsultasi E-Registrasi UMKM Pangan Olahan	Luring	2022-10-25 s.d 2022-10-25	40	91,42
No	Nama Kegiatan	Secara	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	Nilai event kegiatan
35	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis Aspek CDOB	Luring dan Daring	2022-11-23 s.d 2022-11-24	171	99,07
36	Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis dan Desk Konsultasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Luring	2022-11-29 s.d 2022-11-29	30	93,11

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang untuk mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah pelaksanaan desk konsultasi, pendampingan pelaku usaha dalam proses penyelesaian CAPA dalam rangka sertifikasi maupun registrasi produk, serta kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara luring, maupun daring seperti kegiatan Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM di Semarang dengan pemilihan materi sesuai kebutuhan pelaku usaha dan penyajian materi oleh narasumber yang berkompeten.

Survei pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha ini memperoleh banyak saran dan masukan dari pelaku usaha, diantaranya berupa apresiasi terkait manfaat pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan kegiatan serupa diadakan secara berkala, usulan materi kegiatan selanjutnya, dan sebagainya. Kondisi pandemi juga mempengaruhi pemilihan media pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, yang dulunya dilakukan secara tatap muka langsung menjadi online. Pelayanan online memiliki keterbatasan dibanding pelayanan tatap muka langsung sehingga



berpengaruh pada kepuasan pelaku usaha, diantaranya kendala jaringan internet, materi bimbingan dan pembinaan yang kebanyakan bersifat teknis dan mendetail untuk dapat disampaikan secara online.

Berdasarkan hasil survei periode 2022, direkomendasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan BBPOM di Semarang memperhatikan kecukupan waktu pelaksanaan dan juga hal-hal dalam aspek tangible karena merupakan aspek yang nilainya berada di bawah aspek yang lain. Peran dan awareness penyelenggara kegiatan bimbingan dan pembinaan BPOM juga perlu ditingkatkan, termasuk dalam perencanaan target jumlah pelaku usaha yang akan diberikan kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) dan monitoring KBP. Dengan adanya target, maka dapat ditentukan minimal responden yang diharapkan, sehingga data survei menjadi lebih baik dan lebih representatif. Pendalaman untuk menggali persepsi petugas penyelenggara KBP terhadap kegiatan yang diselenggarakan juga akan memperkaya hasil survei IKEPU dan menajamkan rekomendasi yang disusun karena dapat memotret gambaran yang lebih komprehensif dari dua sisi; sisi pelaku usaha yang diberi layanan KBP dan sisi petugas yang menyelenggarakan layanan. Hal ini ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan bimbingan dan pembinaan di tahun 2022 ini.

IKK 3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diukur pada akhir tahun.

Tabel 18 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan TW IV Tahun 2022

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi			Capaian TW IV	Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TW IV		
8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,16	72,16	Hasil Survei oleh PRKOM	-	-	75,08	104,05

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.



Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy.

Hasil survey yang dilakukan oleh PRKOM tahun 2022 terhadap indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Semarang yaitu 75,08% sehingga capaian yang diperoleh yaitu 104,05% dengan kategori capaian MEMENUHI EKSPEKTASI. Dari hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat di Jawa Tengah puas terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang.

Analisa Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja

- Melakukan kegiatan sosialisasi, kampanye serta pemasangan iklan di media elektronik yaitu radio, dan SMS Blast, media cetak melalui koran, dan media luar ruang (baliho), serta media social (facebook, website, Instagram, twitter) dan penyuluhan langsung ke masyarakat agar terinformasi dengan baik dan lebih luas sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat.
- Mempublikasikan kepada masyarakat kinerja pengawasan obat dan makanan melalui media social (Instagram, twitter, TikTok, facebook, website) sehingga masyarakat mengetahui kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Yogyakarta.
- Menjalinkan kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, asosiasi, pelaku usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media sehingga meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan.

IKK.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang dihitung oleh Inspektorat Badan POM berdasarkan hasil survey terhadap responden yang telah menerima 3 (tiga) layanan yaitu layanan pengujian, layanan SKI/SKE dan layanan informasi dan pengaduan. Responden disiapkan oleh pihak balai dan mengisi link survei yang telah disediakan.

Survey awal dilakukan pada triwulan I dan dilanjutkan dengan pengolahan data, hasil survey sementara sampai akhir triwulan IV berdasarkan mutu layanan, realisasi SKM 94,18 dengan capaian 103,5 termasuk kategori Memenuhi Ekspektasi.

Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap



Layanan Publik BPOM TW IV 2022

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi				Capaian TW IV	Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut			
9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91	91	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama	-	-	94,18	103,5	



Gambar 12 Nilai SKM 2022 di SAPA APIP BPOM (Per Desember 2022)

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Petugas yang kompeten dalam melakukan layanan informasi dan pengaduan. Persamaan persepsi antar petugas dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pelatihan, sosialisasi, seminar
- Responden yang akan mengisi survey diberi informasi terlebih dahulu bahwa pengisian survey terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Balai Besar POM Di Semarang termasuk sarana pendukungnya, bukan layanan dari Badan POM.
- Pembuatan inovasi pelayanan yang terus menerus dan berkembang serta penyesuaian materi secara cepat dan tepat, dengan *Up-date* peraturan dan kebijakan baru dari Badan POM.
- Fasilitas pelayanan publik yang terus menerus ditingkatkan
- Sikap dan perilaku petugas (melayani dengan sepenuh hati)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- BBPOM di Semarang melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pelanggan secara mandiri, dan dievaluasi setiap bulan. Pelaksanaan SKM di Balai selain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, juga bertujuan untuk mendapatkan saran/masukan dari pelanggan.
- Kegiatan Lakone Sekti sebagai salah satu inovasi untuk mendekatkan

BBPOM di Semarang hadir langsung ke Masyarakat yang berasal dari Kabupaten yang jauh dari kota Semarang (untuk periode tahun 2022, pelaksanaan kegiatan ini telah diperluas yang tadinya hanya di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen, sekarang juga dilaksanakan di MPP Kabupaten Purworejo, Boyolali, dan Kudus)

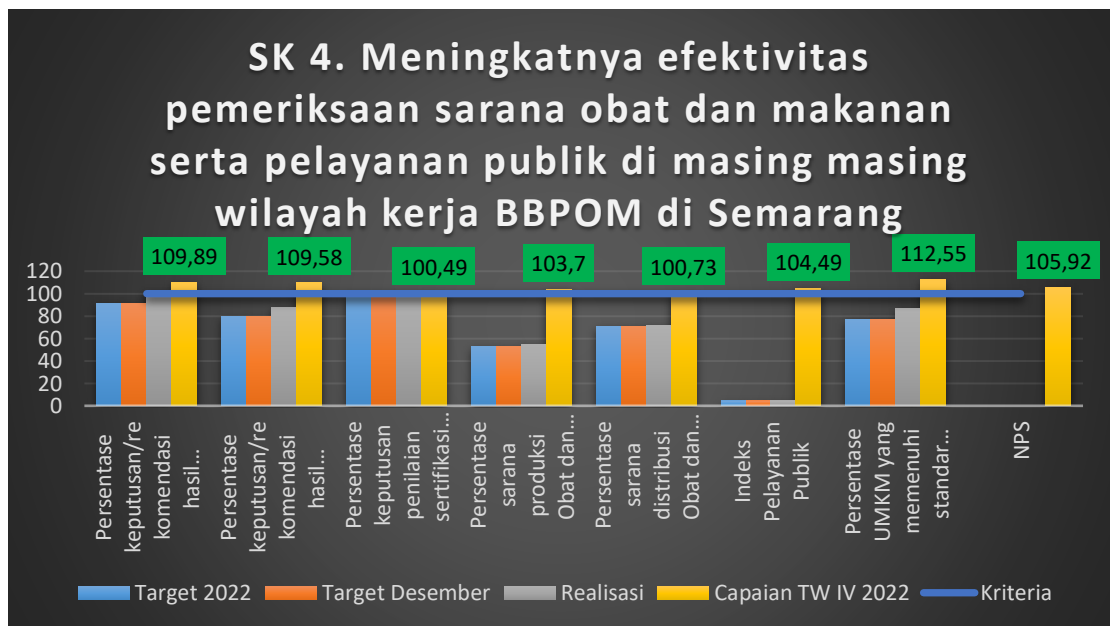
- Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Sinau on line sareng (SOS) BBPOM di Semarang, inovasi SIULAN yang dilakukan rutin sebulan sekali, dan inovasi “Melon Manis (MELalui Online Memberikan InformaSi) yang memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat serta menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.
- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik secara berkala minimal 1x setahun, untuk menjaring masukan dan informasi yang diperlukan sebagai langkah perbaikan terhadap layanan yang sudah ada.

3.2.4 *Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang*

Tabel 20 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Desember	Realisasi	Capaian TW IV 2022	Kriteria
4 Meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	100	109,89	Memenuhi Ekspektasi
	11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80	80	87,66	109,58	Memenuhi Ekspektasi
	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,2	99,2	99,68	100,49	Memenuhi Ekspektasi
	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53	53	54,96	103,7	Memenuhi Ekspektasi
	14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71,52	100,73	Memenuhi Ekspektasi
	15 Indeks Pelayanan Publik	4,45	4,45	4,65	104,49	Memenuhi Ekspektasi
	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	77	86,67	112,55	Memenuhi Ekspektasi
NPS					105,92	Memenuhi Ekspektasi





Gambar 13 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK4

IKK.4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW IV, mencapai 100% jika dibandingkan dengan target 91%, maka capaian sampai dengan TW IV adalah 109,89% (memenuhi ekspektasi). Sedangkan bila dibandingkan terhadap target tahun 2022 juga memenuhi ekspektasi (109,89%) karena target tahunan sama dengan target TW IV

Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW IV

Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW IV

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Pembilang		Realisasi		Capaian TW IV	Capaian 2022	
					Penyebut	TW IV			
10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh BBPOM di Semarang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Semarang + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Semarang + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh BBPOM di Semarang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / BBPOM di Semarang lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di	61		61	100	109,89	109,89

Pengawasan indikator kinerja kegiatan ini, ada 4 (empat) komponen sebagai pengukur. Hal ini untuk mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan merupakan yang komprehensif dan dilakukan oleh Badan POM bersama lintas sektor yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan. Pada IKU ini yang diukur adalah rekomendasi dan tindak lanjut yang diberikan oleh masing-masing unit kerja untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

Semakin membaiknya situasi dan kondisi akhir-akhir ini mendorong peningkatan perekonomian secara global, sangat mendukung pelaku usaha bangkit kembali sehingga turut berdampak dalam melakukan perbaikan dalam upaya pemenuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.

- Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi turut berperan dan mempermudah komunikasi dan tukar informasi baik antar pemerintah maupun dari pemerintah kepada pelaku usaha dan sebaliknya.
- Adanya kemudahan dalam perizinan dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (jemput bola) memudahkan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat bersaing dengan sehat.

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Melakukan pemantauan terhadap surat tindak lanjut hasil inspeksi yang telah dikirimkan kepada pelaku usaha dan memberikan pendampingan/konsultasi khususnya bagi UMKM sehingga dapat segera menyelesaikan penyusunan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan atas temuan inspeksi.
- Koordinasi dan sinergisme dengan lintas sektor / stakeholder yang terus menerus dilakukan demi kelangsungan usaha dan kemajuan bagi pelaku usaha khususnya UMKM.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah :

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Koordinasi dan sinergisme dengan lintas sektor / stakeholder yang terus menerus dilakukan demi kelangsungan		Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi baik dengan pusat, lintas sektor	Terus menerus



	usaha dan kemajuan bagi pelaku usaha khususnya UMKM.		maupun pelaku usaha secara formal (surat) maupun non formal (whatsapp).	
2	Mengirimkan surat tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha melalui media seperti Whatsapp agar lebih cepat diterima dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.		Mengirimkan surat tindak lanjut melalui Whatsapp kepada pelaku usaha	Desember 2022 (terus menerus)
3	Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam menyelesaikan penyusunan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan atas temuan inspeksi.	Melakukan <i>desk CAPA</i> (Oktober 2022)	Memberikan pelayanan konsultasi bagi pelaku usaha dalam penyelesaian <i>CAPA</i> (secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>)	Desember 2022 (terus menerus)
		Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk konsultasi	Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk konsultasi secara <i>online</i> sehingga dapat menghemat waktu.	
			Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan secara <i>online</i> (<i>Sinau Online Sareng</i>) sehingga dapat menghemat waktu.	

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK.4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Realisasi IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW IV mencapai 109,58 % jika dibandingkan target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 80,00% maka capaian sampai dengan TW IV adalah 87,66% (memenuhi ekspekstasi). Demikian juga capain TW IV memenuhi ekspektasi jika dibandingkan dengan target tahun 2022 karena target tahunan sama dengan target TW IV.

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022

BBPOM di Semarang



Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan TW IV 2022

Indikator	Target TWIV	Target 2022	Realisasi				Capaian TWIV	Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TWIV			
11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80	80	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n	398	304	87,66	109,58	109,58

Perlu dilakukan pengawalan, evaluasi dan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Badan POM. Koordinasi dan komunikasi sangat penting untuk memantau tindak lanjut terhadap hasil inspeksi. Pemahaman yang sama dan kompetensi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan menjadi hal yang sangat penting agar rekomendasi segera ditindaklanjuti.

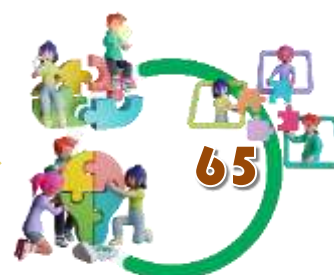
Perlu strategi khusus dan komitmen yang kuat agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pengawasan Obat dan Makanan harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan guna perlindungan bagi masyarakat.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Koordinasi dan sinergisme dengan lintas sektor / stakeholder yang terus menerus dilakukan demi kelangsungan usaha dan kemajuan bagi pelaku usaha khususnya UMKM.
- Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi turut berperan sehingga memudahkan dalam melakukan komunikasi dan tukar informasi antar pemerintah maupun dengan stakeholder.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Berkomunikasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut secara terus menerus untuk memastikan keputusan hasil inspeksi yang disampaikan dilaksanakan.
- Terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang menjadi tugas bersama dengan lintas sektor maupun stakeholder.



Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

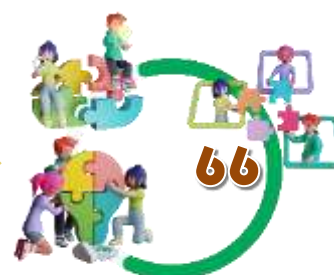
Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Koordinasi dan sinergisme dengan lintas sektor / stakeholder yang terus menerus dilakukan demi kelangsungan usaha dan kemajuan bagi pelaku usaha khususnya UMKM.	Rapat Lintas Sektor (Desember 2022)	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor secara formal (surat) dan non formal (whatsapp).	Terus menerus
			Berkomunikasi dengan pelaku usaha dan melakukan pendampingan baik dengan tatap muka maupun lewat media seperti whatsapp.	
2	Terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang menjadi tugas bersama dengan lintas sektor maupun stakeholder.	Sosialisasi isu / peraturan terbaru (Desember 2022)	Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan secara <i>daring</i> maupun <i>luring</i> .	Terus menerus

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya



IKK.4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Pada TW IV Tahun 2022, realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99,68% dan jika dibandingkan dengan target (99,2%), maka capaian sampai dengan TW IV adalah 100,49% sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif). Jika dibandingkan dengan target (99,2%), maka realisasi TW IV ini telah melampaui target. Namun BBPOM di Semarang akan terus berusaha mempertahankan, bahkan meningkatkan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023.

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator	Target TWIV	Target 2022	Realisasi				Capaian TWIV	Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut			
12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,2	99,2	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	5.366	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	5.383	99,68	100,49

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Perubahan sistem e-bpom.pom.go.id karena proses integrasi ke pusat data nasional, yaitu penghilangan fitur notifikasi sehingga menyebabkan adanya pengajuan SKI/SKE tidak diketahui dan seringnya error pada sistem e-bpom.pom.go.id
2. Perubahan sistem sertifikasi dan registrasi Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Kosmetik sehubungan dengan integrasi sistem OSS

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Melakukan *regulatory assistance* untuk PBF yang akan mengajukan permohonan dan program Desk CAPA untuk PBF yang sedang dalam proses CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) serta pelayanan konsultasi *online* maupun *offline* dalam rangka sertifikasi CDOB
- Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam Rangka Sertifikasi CPOTB Bertahap, CPKB, Rekomendasi Pemohon Notifikasi



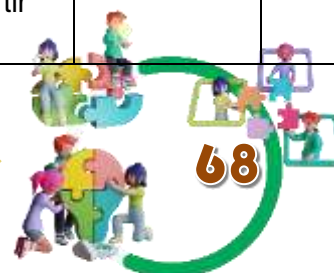
Kosmetik, Rekomendasi PSB, serta Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan dan BTP

- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, DPMPTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Peternakan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha
- Melakukan proaktif jemput bola terhadap sarana produksi yang akan melakukan kegiatan produksi, antara lain berupa: bantuan untuk merancang denah bangunan industri kosmetik disesuaikan dengan kondisi/kemampuan pelaku usaha, namun tetap sesuai persyaratan CPKB, pendampingan terhadap pemenuhan persyaratan GMP sarana produksi pangan dan kosmetik, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang data sarana PIRT yang siap naik kelas menuju MD, membuka pojok konsultasi pada kegiatan pameran yang melibatkan UMKM dan memotivasi mereka agar mendaftarkan produknya
- Pendampingan registrasi melalui *online* dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp nomor WA 081227701941

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Perubahan sistem e-bpom.pom.go.id karena proses integrasi ke pusat data nasional, yaitu penghilangan fitur notifikasi sehingga menyebabkan adanya pengajuan SKI/SKE tidak diketahui dan seringnya error pada sistem e-bpom.pom.go.id.	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat koordinasi internal dalam rangka <i>refresh update</i> terkait perubahan fitur pada sistem e-bpom.pom.go.id ● Melakukan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi BPOM terkait error pada sistem e-bpom.pom.go.id ● Meningkatkan komunikasi dengan Eksportir/Importir terkait informasi terkini 	-	-



	Perubahan sistem sertifikasi dan registrasi Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Kosmetik sehubungan dengan integrasi sistem OSS.	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan Bimbingan Teknis baik secara luring maupun daring kepada pelaku usaha terkait Peraturan dan Sistem Sertifikasi dan Registrasi terkini. ● Pendampingan registrasi melalui <i>online</i> dengan petugas Sertifikasi meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan whatsapp nomor WA 081227701941 	-	-
--	---	--	---	---

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK.4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Capaian IKK persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW IV mencapai 103,25% dengan kategori memenuhi ekspektasi, baik terhadap target TW IV maupun target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 53%.

Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW IV Tahun 2022

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi				Capaian TW IV	Capaian 2022	
			Pembilang	Penyebut	TW IV				
13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53	53	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	216	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n	393	54,96	103,7	103,7

Penetapan sarana produksi yang dijadikan target pemeriksaan berdasarkan analisa risiko yang meliputi beberapa aspek, dengan sistem pembobotan menjadi dasar keputusan dilakukannya pengawasan. Sarana produksi yang diperiksa meliputi sarana industri farmasi, sarana industri obat tradisional, sarana usaha kecil obat tradisional, sarana usaha mikro obat tradisional, industri kosmetik, sarana



produksi pangan MD dan sarana industri rumah tangga pangan (PIRT). Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan keberhasilan program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang, sehingga pelaku usaha mampu menerapkan *Good Manufacturing Practice* pada proses produksi.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Pelaku usaha mulai bangkit dan berkembang lagi seiring semakin membaiknya kondisi perekonomian secara global sehingga mendorong pelaku usaha menghasilkan produk yang bermutu, aman dan berdaya saing.
- Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha sehubungan dengan terbitnya peraturan atau ketentuan baru khususnya yang saat ini dikembangkan melalui *online* (terintegrasi) agar kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat terselesaikan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Pengawasan dan pembinaan serta pendampingan terus dilakukan agar produsen mampu menghasilkan produk yang memenuhi syarat mutu / kualitas dan keamanan yaitu melalui pengawasan rutin maupun pelaksanaan kegiatan seperti bimbingan teknis, seminar, konsultasi dll.
- Pelaksanaan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penyelesaian / pembuatan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) yang harus dibuat oleh produsen setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas.
- Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan secara daring maupun luring seperti sosialisasi isu / peraturan terbaru

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:



Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pelaku usaha mulai bangkit dan berkembang lagi seiring semakin membaiknya kondisi perekonomian secara global sehingga mendorong pelaku usaha menghasilkan produk yang bermutu, aman dan berdaya saing.	Pelaksanaan <i>a desk CAPA</i> bagi industri farmasi, pangan & kosmetik (Oktober 2022)	Melakukan pengawasaan secara <i>onsite</i> (dengan tetap penerapan protokol kesehatan) terhadap sarana produksi untuk mendekatkan diri dengan pelaku usaha sehingga secara bersama-sama mencari solusi terbaik apabila pelaku usaha menghadapi kendala / hambatan.	Desember 2022 (terus menerus)
2	Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha sehubungan dengan terbitnya peraturan atau ketentuan baru khususnya yang saat ini dikembangkan melalui <i>online</i> (terintegrasi) agar kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat terselesaikan.		Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan secara <i>daring</i> maupun <i>luring</i> seperti sosialisasi isu / peraturan terbaru	Desember 2022 (terus menerus)
			Memberi kemudahan dan pelayanan terbaik sehingga mendorong pelaku usaha untuk maju dan berkembang.	

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK.4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja Kegiatan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW IV, mencapai realisasi 71,52% dari target yang ditetapkan sebesar 71 %, sehingga capaian kinerja sebesar 100,73% dengan kategori memenuhi ekspektasi. Demikian juga bila dibandingkan dengan target tahun 2022.

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022

BBPOM di Semarang



Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW IV 2022

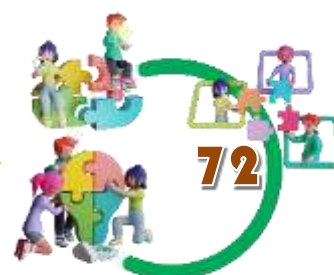
Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi				Capaian TW IV	Capaian 2022	
			Pembilang		Penyebut				
14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	796	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	1113	71,52	100,73	100,73

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara terus mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri.
- Pengawasan, pendampingan dan monitoring pengelolaan vaksin mendorong pengelolaan vaksin di sarana distribusi dan pelayanan dengan dilakukan dengan baik dan benar.
- Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi turut berperan dan mempermudah komunikasi dan tukar informasi dari pemerintah kepada pelaku usaha maupun masyarakat sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen sehingga cerdas dalam memilih produk.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten terhadap sarana distribusi agar menerapkan Cara Distribusi yang Baik sehingga produk disimpan dan dikelola sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, memiliki izin edar, bermutu dan berkualitas dan tidak kadaluwarsa.
- Terus melakukan pengawasan dalam pengelolaan vaksin di rantai distribusi obat mulai dari pengelolaan di Intalasi Farmasi / Gudang Farmasi Kabupaten/Kota, pendistribusian dan pengelolaannya di sarana pelayanan yaitu di Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik. Selain melakukan inspeksi, juga memberikan bimbingan teknis di tempat sehingga turut meningkatkan capaian sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan



Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

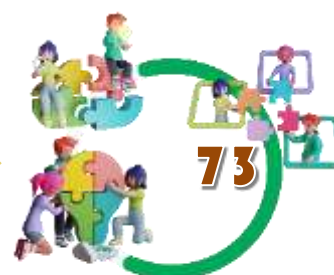
Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara terus mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan melakukan pengawasan mandiri.		Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sarana distribusi secara <i>on site</i> sekaligus memberikan pendampingan (jika diperlukan).	Desember 2022 (terus menerus)
			Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan konsultasi khususnya bagi pelaku usaha dalam membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atau <i>CAPA (Corrective Action and Preventive Action)</i> hasil inspeksi petugas.	Desember 2022 (terus menerus)
2	Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi turut berperan dan mempermudah komunikasi dan tukar informasi dari pemerintah kepada pelaku usaha maupun masyarakat sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen sehingga cerdas dalam memilih produk.		Melakukan sosialisasi (baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i>) kepada semua pihak termasuk pelaku usaha apabila ada peraturan / pedoman / isu terbaru sehingga segera dapat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku	Desember 2022 (terus menerus)
			Terus mengedukasi masyarakat (baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i>) agar menjadi konsumen yang cerdas sehingga mampu memilih produk yang aman dan berkualitas.	

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya



IKK.4.6 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)
- Profesionalitas SDM (18%)
- Sarana Prasarana (15%)
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
- Konsultasi dan Pengaduan (15%)
- Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks pelayanan publik dihitung oleh Badan POM dan dimunculkan nilainya di akhir tahun atau TW IV dengan kategori nilai:

Tabel 26 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Range Nilai	Kategori	Makna
0-1,00	F	Gagal
1,01-1,50	E	Sangat Buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51-4,00	B	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima

Tabel 27 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik TW IV Tahun 2022

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi			Capaian TW IV	Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TW IV		
15 Indeks Pelayanan Publik	4,45	4,45	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM	-	-	4,65	104,49

Pada tahun 2022, nilai indikator 'Indeks Pelayanan Publik' yang diperoleh BBPOM di Semarang sebesar 4,65. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 4,45. Dengan demikian, jika capaian TW IV dihitung terhadap target tahun 2022, maka diperoleh capaian sebesar 104,49%, dikatakan Memenuhi Ekspektasi, sehingga dapat disimpulkan Efektif.



Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi penyempurnaan kinerja), yaitu :

1. Kebijakan Pelayanan

- a) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik agar mengacu pada PermenPANRB No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan FKP
- b) Berita Acara FKP agar ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur masyarakat yang hadir
- c) Memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
- d) Pada publikasi Standar Pelayanan memuat minimal 6 komponen service delivery pada seluruh media publikasi baik non elektronik dan elektronik.
- e) Pengaturan mengenai sistem istirahat bergilir bagi petugas layanan tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat istirahat dan penambahan ekstra pelayanan.
- f) Agar menindaklanjuti saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM seluruhnya sebelum terbit laporan SKM.

2. Profesionalisme SDM

Peningkatan kompetensi menyesuaikan kebutuhan petugas pelayanan yang disertai data dukung berupa informasi mengenai kompetensi SDM, posisi penugasan, masa kerja, pendidikan, pelatihan, dan sertifikat.

Waktu pelayanan publik pada standar pelayanan agar tercantum secara jelas, minimal sama dengan jam kerja dan termasuk mengatur terkait jadwal pelayanan ekstra.

Perlu menetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik. Bagi UPP yang memiliki gap kompetensi, agar menyediakan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai khususnya bagi petugas layanan publik.

3. Sarana Prasarana

Apabila memungkinkan, sarana front office untuk layanan konsultasi dan pengaduan berada pada ruangan khusus yang mudah diakses pengguna layanan.

Tersedia sarana prasarana berkebutuhan khusus yang mendukung dalam pemberian layanan bagi kelompok rentan seperti petugas khusus, kursi roda, toilet khusus disabilitas, SP huruf braille dan lain sebagainya.

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Agar melengkapi unsur-unsur sistem informasi (unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga) pada subsite UPP BPOM.

Untuk keamanan data elektronik, seluruh UPP agar menggunakan subsite yang telah disediakan Pusdatin dengan domain pom.go.id.

Penyebarluasan informasi secara elektronik sangat baik namun agar tidak melupakan penyebaran informasi non elektronik agar memberi akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan IT.

Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa



poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT.

5. Konsultasi dan Pengaduan

UPP diharapkan mendokumentasikan hasil konsultasi dan pengaduan baik secara fisik maupun elektronik, dan secara berkala agar mempublikasikan hasil layanan konsultasi dan pengaduan baik secara elektronik maupun fisik dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan informasi melalui media sosial dan FAQ pada subsite UPP.

Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profilpelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT.

Untuk konsultasi dan pengaduan yang sering ditanyakan dibentuk FAQ pada menu di subsite unit kerja.

6. Inovasi

Setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi.

Dalam pelaksanaan replikasi, UPP mendokumentasikan setiap inovasi yang telah direplikasi oleh organisasi pelayanan publik lain.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

BBPOM Semarang telah mendorong UPP pro aktif mewujudkan dan berpartisipasi dalam Mall Pelayanan Publik di daerah.

Sudah dilakukan penambahan toilet duduk/jongkok untuk pengguna layanan.

Pelaksanaan FKP agar mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi:

- (a) tokoh masyarakat;
- (b) akademisi;
- (c) dunia usaha;
- (d) LSM

serta melibatkan media massa yang diharapkan juga menjadi corong dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Penetapan maklumat pelayanan diperbaharui dengan menyesuaikan narasi berupa janji instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Inovasi pelayanan publik (Melon Manis) diikutsertakan dalam KIPP.



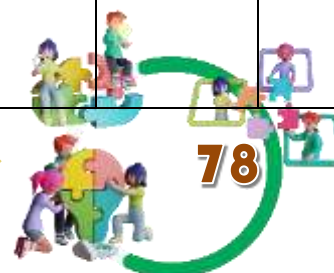
Tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan baik internal maupun eksternal, adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

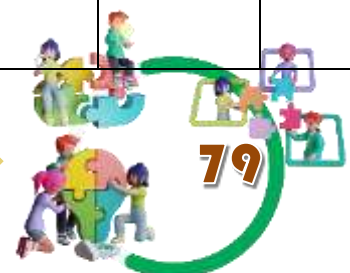
No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	<p>Kebijakan Pelayanan</p> <p>a) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik agar mengacu pada PermenPANRB No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan FKP</p> <p>b) Berita Acara FKP agar ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur masyarakat yang hadir</p> <p>c) Memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat</p> <p>d) Pada publikasi Standar Pelayanan memuat minimal 6 komponen service delivery pada seluruh media publikasi baik non elektronik dan elektronik.</p> <p>e) Pengaturan mengenai sistem istirahat bergilir bagi petugas layanan tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat istirahat dan penambahan ekstra pelayanan.</p> <p>f) Agar menindaklanjuti saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM seluruhnya sebelum terbit laporan SKM.</p>	Hal-hal yang menjadi pendukung pelayanan publik telah dilakukan selama tahun 2022		



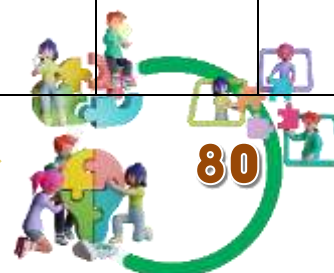
2	<p>Profesionalisme SDM</p> <p>a) Peningkatan kompetensi menyesuaikan kebutuhan petugas pelayanan yang disertai data dukung berupa informasi mengenai kompetensi SDM, posisi penugasan, masa kerja, pendidikan, pelatihan, dan sertifikat.</p> <p>b) Waktu pelayanan publik pada standar pelayanan agar tercantum secara jelas, minimal sama dengan jam kerja dan termasuk mengatur terkait jadwal pelayanan ekstra.</p> <p>c) Perlu menetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik. Bagi UPP yang memiliki gap kompetensi, agar menyediakan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai khususnya bagi petugas layanan publik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi SDM / petugas pelayanan publik telah dilakukan - Penyesuaian jadwal pelayanan publik sesuai jam kerja kantor telah dilakukan 		
3	<p>Sarana Prasarana</p> <p>a) Apabila memungkinkan, sarana front office untuk layanan konsultasi dan pengaduan berada pada ruangan khusus yang mudah diakses pengguna layanan.</p> <p>b) Tersedia sarana prasarana berkebutuhan khusus yang mendukung dalam pemberian layanan bagi kelompok rentan</p>	<p>Telah tersedia sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang mudah diakses oleh pengguna layanan</p>		



	seperti petugas khusus, kursi roda, toilet khusus disabilitas, SP huruf braille dan lain sebagainya.			
4	<p>Sistem Informasi Pelayanan Publik</p> <p>a) Agar melengkapi unsur-unsur sistem informasi (unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga) pada subsite UPP BPOM.</p> <p>b) Untuk keamanan data elektronik, seluruh UPP agar menggunakan subsite yang telah disediakan Pusdatin dengan domain pom.go.id.</p> <p>c) Penyebarluasan informasi secara elektronik sangat baik namun agar tidak melupakan penyebaran informasi non elektronik agar memberi akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan IT.</p> <p>d) Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT.</p>	<p>Sistem informasi pelayanan publik BBPOM di Semarang menggunakan subsite yang terjamin keamanannya dengan domain pom.go.id</p>		



5	<p>Konsultasi dan Pengaduan</p> <p>a) UPP diharapkan mendokumentasikan hasil konsultasi dan pengaduan baik secara fisik maupun elektronik, dan secara berkala agar mempublikasikan hasil layanan konsultasi dan pengaduan baik secara elektronik maupun fisik dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan informasi melalui media sosial dan FAQ pada subsite UPP.</p> <p>b) Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT. Untuk konsultasi dan pengaduan yang sering ditanyakan dibentuk FAQ pada menu di subsite unit kerja.</p>	<p>BBPOM di Semarang semakin meningkatkan layanan informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain maupun elektronik berupa layanan konsultasi online melalui whatsapp, email dan zoom meeting</p>		
6	<p>Inovasi</p> <p>a) Setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi.</p> <p>b) Dalam pelaksanaan replikasi, UPP mendokumentasikan setiap inovasi yang telah direplikasi oleh organisasi pelayanan publik lain.</p>	<p>Setiap inovasi terkait pelayanan publik didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan</p>		



IKK.4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a) Ruang Lingkup UMKM:

UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

UMKM pada bidang obat tradisional (OT) mencakup Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) meliputi:

- 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

UMKM pada bidang kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

b) UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan



Nomor Notifikasi Kosmetik)

4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

c) Kriteria UMKM yang didampingi:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan

- Untuk UMKM OT :

- 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
- 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
- 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (*start-up*),
- 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
- 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor

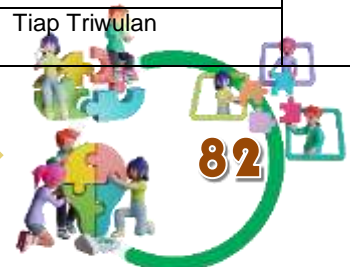
- Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha
- 2) Industri kosmetik yang belum memiliki sertifikasi CPKB dan notifikasi kosmetik

d) Tahapan Pendampingan UMKM :

Tabel 28 Tahapan Pendampingan UMKM

Komoditi	No.	Tahapan	Bobot	Waktu Pelaksanaan	Target UMKM Tahun n
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	Februari	5
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	Maret-April	
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	Maret-Oktober	
	4	Sertifikasi	20%	September-November	
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	Tiap Triwulan	



Komoditi	No.	Tahapan	Bobot	Waktu Pelaksanaan	Target UMKM Tahun n
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	Januari	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	Februari-Maret	
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	Februari-November	
	4	Pelaporan kepada Direktur, Deputi 2, Kepala Rorenkeu	10%	November	
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	Januari-Maret	25
	2	Bimtek CPPOB	20%	April-Mei	
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	Juni-September	
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	Oktober-November	
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	Desember	

e) Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Tabel 29 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW IV 2022

Indikator	Target TWIV	Target 2022	Realisasi				Capaian TWIV	Capaian 2022	
			Pembilang	Penyebut	TWIV				
16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	77	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n	-		-	86,67	112,55	112,55

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022

BBPOM di Semarang



Triwulan IV mencapai realisasi 86,67% dari target yang ditetapkan sebesar 77%, sehingga capaian kinerja sebesar 112,55% sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif).

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia karena munculnya varian Omicron khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pendampingan.
- Adanya UMKM yang mengundurkan diri dari Program Pendampingan karena tidak bersedia melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.

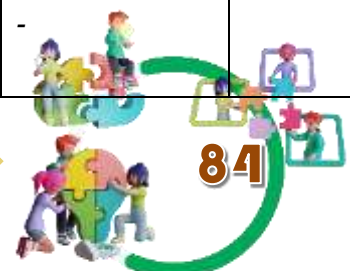
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Melakukan seleksi awal UMKM yang akan masuk ke Program Pendampingan untuk memastikan komitmen dan kesiapan sarana dalam proses sertifikasi sehingga dapat memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkesinambungan antara lain: Inspektur Pangan, Penyuluh Keamanan Pangan, Inspektur CPOTB, Inspektur CPKB Junior, Inspektur CPKB Senior, Inspektur CPKB Kepala.
- Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif percepatan pemenuhan dokumentasi CPOTB terhadap pelaku usaha OT yang belum mempunyai sertifikat CPOTB bertahap.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia karena	Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif	-	-



	munculnya varian Omicron khususnya di wilayah Jawa Tengah, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pendampingan.	untuk percepatan pemenuhan dokumentasi dan perbaikan sarana di UMKM Pangan, Obat Tradisional, maupun Kosmetik menggunakan berbagai media baik <i>offline</i> maupun <i>online</i> .		
	Adanya UMKM yang mengundurkan diri dari Program Pendampingan karena tidak bersedia melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.	Menggantikan UMKM Target Pendampingan yang mengundurkan diri dengan UMKM yang lebih berkomitmen untuk melakukan perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik.	-	-

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.2.5 Meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 30 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Desember	Realisasi	Capaian TW IV 2022	Kriteria
5 Meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93	93	93,38	100,41	Memenuhi Ekspektasi
	18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	79	79	87	110,13	Memenuhi Ekspektasi
	19 Jumlah desa pangan aman	28	28	28	100	Memenuhi Ekspektasi
	20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	16	16	16	100	Memenuhi Ekspektasi
NPS					102,64	Memenuhi Ekspektasi

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022

BBPOM di Semarang





Gambar 14 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK5

IKK.5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tabel 31 Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan TW IV

Indikator	Target TWIV	Target 2022	Realisasi			Capaian TWIV	Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TWIV		
17 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93	93	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor	-	-	93,38	100,41

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan



Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM.

Tabel 1 Interpretasi Nilai Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks	Interpretasi Efektifitas
< 65	Kurang efektif
65,01 – 75	Cukup efektif
75,01 – 85	Efektif
85,01 – 95	Sangat efektif
95,01 – 100	Sangat efektif sekali

Di TW IV tahun 2022, nilai tingkat efektifitas KIE di BBPOM di Semarang telah dihitung oleh Badan POM dengan link survey yang disebarakan kepada 239 responden, dengan nilai sebesar 93,38 capaian 100,41% dan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI. Nilai tingkat efektifitas KIE di TW IV ini juga telah melebihi target tahun 2022.

Berdasarkan interpretasi efektifitas, nilai Indeks efektifitas KIE obat dan makanan di BBPOM Semarang termasuk dalam kategori sangat efektif.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber
- Masyarakat sudah banyak yang sadar teknologi, sehingga layanan informasi dari media sosial telah dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat.
- Penyesuaian isi materi, terutama materi yang ditayangkan di media social, media cetak, dan media elektronik, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai latar belakang.
- Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui media elektronik/cetak, media sosial (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter), Subsite, dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat.
- Telah dialokasikan waktu dalam penyampaian kuesioner serta mengoptimalkan media komunikasi (Whatsapp Group) yang ada.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

Penggunaan alat peraga dan mempratekkan cara mengolah dan memilih obat dan makanan yang aman pada saat KIE tatap muka. Kegiatan KIE secara tatap muka

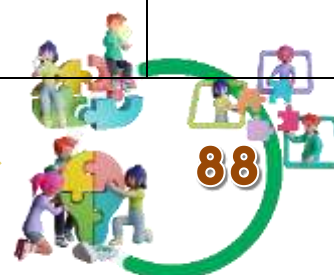
dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, sedangkan upaya lain dilakukan dengan praktek langsung aplikasi BPOM Mobile.

KIE melalui inovasi “Melon Manis (MELalui Online Memberikan InformaSi) memberikan kemudahan dan keefektifan informasi kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat khususnya pelaku usaha. Penganekaragaman kelompok peserta KIE yaitu pada kelompok generasi millennial melalui kegiatan Pemilihan Duta Kosmetik Aman 2022, dan kegiatan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa sehingga diharapkan akan lebih mudah menerima dan memahami materi yang disampaikan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Keterbatasan pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber	Peningkatan kompetensi narasumber dan setiap selesai melakukan tugas sebagai narasumber, dilakukan evaluasi dengan penyebaran kuesioner untuk mengetahui kemampuan narasumber dalam memberikan materi dan topik materi yang diharapkan oleh peserta.		
	Sebagian besar masyarakat masih belum sadar teknologi, sehingga layanan informasi dari media sosial hanya bisa diakses terutama oleh para generasi milenial,	Kegiatan KIE yang dilaksanakan secara tatap muka dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, jika peserta jumlahnya banyak maka pelaksanaan kegiatan KIE dibagi menjadi		



		beberapa sesi atau digunakan metode kombinasi luring dan daring.		
	Masih banyak daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah belum memiliki jaringan internet yang memadai.	Pemutakhiran materi tayangan atau konten informatif, terutama yang ditayangkan di media sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang terkini.		
	Keterbatasan waktu dalam penyampaian kuesioner mempengaruhi jumlah responden yang mengisi kuesioner.	Pada saat pelaksanaan KIE, disediakan alokasi waktu untuk pengisian kuesioner sehingga responden dapat mengisi kuesioner tepat waktu dan diberikan penjelasan tentang pengisian kuesioner tersebut.		

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

IKK.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 32 Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman TW IV 2022

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi			Capaian TW IV 2022	Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TW IV		
18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	79	79	B01-B11 : Isi progres capaian s.d bulan n B12 Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n	-	-	87	110,13

Target tahun 2022 adalah sebesar 41 (empat puluh satu) sekolah. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap kader keamanan pangan sekolah. Tujuan dari intervensi ini untuk meningkatkan mutu dan keamanan jajanan anak sekolah, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah, dalam mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu.



Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Advokasi PJAS
2. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Sekolah
3. Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
6. Sertifikasi Sekolah Dengan PJAS Aman
7. Pengawasan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Usia Sekolah (PJAS)

Pada TW IV ini telah dilaksanakan tahapan Sertifikasi dan Pengawasan. Dari 63 sekolah yang dibimtek, seluruhnya telah dilakukan verifikasi terhadap self assesment yang dilakukan dan telah dilakukan sampling serta pengujian jajanan di kantin sekolah yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Setelah proses verifikasi dihasilkan 42 sekolah yang mendapatkan poin 70 keatas dan berhak menerima sertifikat sekolah dengan PJAS Aman. Jumlah sekolah penerima sertifikat sekolah dengan PJAS Aman ini melebihi target tahun 2022 yaitu 38 sekolah. Sehingga pada TW IV seluruh sekolah yang diintervensi telah melalui semua tahapan dan dapat disimpulkan bahwa prosentase capaian program Sekolah Dengan PJAS Aman ini sebesar 110,13% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI.

Tahap Pengawasan juga telah dilaksanakan pada TW IV ini terhadap sekolah intervensi tahun 2020 dan 2021.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Keterbatasan pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber
- Sebagian besar masyarakat masih belum sadar teknologi, sehingga layanan informasi dari media sosial hanya bisa diakses terutama oleh para generasi milenial,
- Masih banyak daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah belum memiliki jaringan internet yang memadai.
- Keterbatasan waktu dalam penyampaian kuesioner mempengaruhi jumlah responden yang mengisi kuesioner sehingga mempengaruhi hasil.
- Adanya pandemi covid menyebabkan kegiatan Intervensi Sekolah Dengan PJAS Aman memerlukan jadwal yang lebih panjang, karena tidak dapat dilaksanakan sekaligus tetapi secara bertahap disesuaikan dengan protokol kesehatan



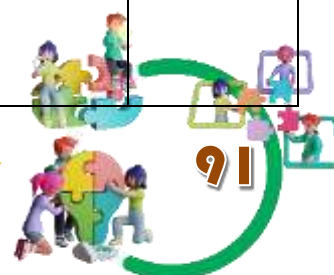
- Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2022.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Sekolah yang diundang sebagian besar hadir karena didukung oleh koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen lintas sektor terkait yang besar dalam mengimplementasikan kegiatan ini.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Keterbatasan pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber	Peningkatan kompetensi narasumber dan setiap selesai melakukan tugas sebagai narasumber, dilakukan evaluasi dengan penyebaran kuesioner untuk mengetahui kemampuan narasumber dalam memberikan materi dan topik materi yang diharapkan oleh peserta.		
2	Sebagian besar masyarakat masih belum sadar teknologi, sehingga layanan informasi dari media sosial hanya bisa diakses terutama oleh para generasi milenial,	Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dan mempermudah dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.		
3	Masih banyak daerah di wilayah provinsi Jawa Tengah belum memiliki jaringan	Tahapan kegiatan intervensi sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman akan dilaksanakan		



	internet yang memadai.	sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi covid-19.		
4	Keterbatasan waktu dalam penyampaian kuesioner mempengaruhi jumlah responden yang mengisi kuesioner.	Pada saat pelaksanaan KIE, disediakan alokasi waktu untuk pengisian kuesioner sehingga responden dapat mengisi kuesioner tepat waktu dan diberikan penjelasan tentang pengisian kuesioner tersebut.		
5	Adanya pandemi covid menyebabkan kegiatan Intervensi Sekolah Dengan PJAS Aman memerlukan jadwal yang lebih panjang, karena tidak dapat dilaksanakan sekaligus tetapi secara bertahap disesuaikan dengan protokol kesehatan	Pandemi Covid sudah mulai berkurang sehingga seluruh tahapan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal tetapi tetap dengan protokol kesehatan		
6	Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2022.	Pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2022		

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

Realisasi pada TW II ini sebanyak 65% dari target 65%, dari realisasi yang ada dapat disimpulkan bahwa prosentase capaian terhadap target TW II sebesar 100% dengan kriteria baik.



Analisa keberhasilan untuk pencapaian sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- Sekolah yang diundang sebagian besar hadir karena didukung oleh koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor terkait berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen lintas sektor terkait yang besar dalam mengimplementasikan kegiatan ini.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya:

- Adanya pandemi covid menyebabkan kegiatan Intervensi Sekolah Dengan PJAS Aman memerlukan jadwal yang lebih panjang, karena tidak dapat dilaksanakan sekaligus tetapi secara bertahap disesuaikan dengan protokol kesehatan
- Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2022.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan dapat digunakan oleh komunitas sekolah sebagai referensi dan mempermudah dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.
- Tahapan kegiatan intervensi sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi covid-19.

IKK.5.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa.

Pada program Desa Pangan Aman, dilakukan gerakan keamanan pangan desa pada beberapa desa. Adapun desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

Keberhasilan program desa pangan aman diukur dari beberapa output dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Desa memiliki Kader keamanan pangan desa yang aktif,
- b. Desa melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa yang



dimiliki,

- c. Desa mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Program desa pangan aman tahun 2022 dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1). Advokasi Lintas Sektor

Advokasi Lintas Sektor bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor/ pemangku kepentingan di daerah.

2). Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa

Bimbingan teknis / pelatihan dilakukan terhadap kader yang telah dipilih oleh pihak desa sebagai ujung tombak yang akan menyebarkan materi dan praktek keamanan pangan di desanya masing-masing. Untuk masing-masing minimal dibentuk 15 kader yang terdiri dari 5 kader dari ibu PKK, 5 kader dari karang taruna dan 5 kader dari guru yang mengajar sekolah dasar di desa intervensi.

3). Bimtek Komunitas Desa dan Intensifikasi Keamanan Pangan

Bimbingan teknis terhadap komunitas yang ada di desa masing-masing, dan dilakukan oleh kader yang sudah terlatih. Tiap desa terdiri dari minimal 50 komunitas yang merupakan perwakilan dari ibu PKK, pelaku usaha ritel, pelaku usaha IRTP, pedagang kreatif lapangan, komunitas sekolah dan komunitas remaja. Bersamaan dengan kegiatan bimtek, juga dilakukan sampling dan uji produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dalam kegiatan intensifikasi keamanan pangan desa serta sampling produk untuk dievaluasi penandaan/label produk sesuai dengan ketentuan.

4). Fasilitasi Keamanan Pangan Desa

Kegiatan pemantauan praktek keamanan pangan desa yang dilakukan oleh kader keamanan pangan desa dengan berkunjung ke rumah/sarana tempat komunitas berada untuk mengetahui sampai sejauh mana praktek keamanan pangan telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

5). Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monev dilakukan untuk mengetahui efektifitas intervensi yang telah dilakukan, sekaligus untuk mengetahui rencana kerja selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak desa terkait dengan keamanan pangan.

6). Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap desa intervensi tahun sebelumnya untuk



mengetahui program kerja mandiri yang telah dilaksanakan. Program pengawalan dilakukan sebagai tindak lanjut dari program GKPD guna memastikan bahwa desa/kelurahan yang sudah diintervensi melanjutkan program-program keamanan pangan.

Program ini meliputi pengawalan terhadap Desa/Kelurahan Pangan Aman yang sudah terbentuk tahun sebelumnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada pengawalan ini berupa pertemuan antara BBPOM Semarang dengan Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan untuk membahas dan berdiskusi mengenai tindak lanjut program-program keamanan pangan di desa/kelurahan tersebut serta bertukar informasi terkait materi keamanan pangan.

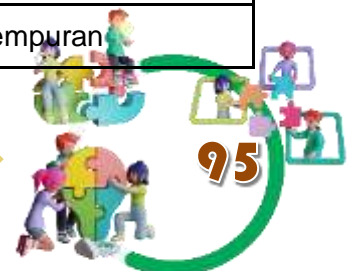
7). Lomba Desa

Lomba desa dilaksanakan untuk memotivasi desa yang telah menerapkan program keamanan pangan secara mandiri dengan pemberian award atau penghargaan.

Pada tahun 2022, desa yang diintervensi program ini sebanyak 28 desa meliputi 9 (sembilan) desa/kelurahan baru yang belum pernah diintervensi dan 19 (sembilan belas) desa yang sudah diintervensi tahun sebelumnya (tahun 2020-2021) untuk pengawalan. Semua tahapan program Desa Pangan Aman terhadap desa yang diintervensi pada akhirnya dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir tahun 2022. Secara rinci, tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman tahun 2022 telah selesai dilaksanakan pada 24 desa di 13 Kabupaten dan 4 kelurahan di 2 Kota, totalnya 28 Desa /Kelurahan di 15 Kabupaten/Kota.

Daftar Desa/kelurahan yang selesai diintervensi tahun 2022:

No	Tahun Intervensi	Nama Kabupaten/Kota	Nama Desa/Kelurahan	
1	2020	Kab. Brebes	1	Desa Kaliwlingi
			2	Desa Malahayu
2	2020	Kab. Pemalang	3	Desa Banjardawa
			4	Desa Banyumudal
3	2020	Kab. Klaten	5	Desa Candirejo
			6	Desa Randusari
4	2021	Kab. Blora	7	Desa Geneng
			8	Desa Tempuran



No	Tahun Intervensi	Nama Kabupaten/Kota	Nama Desa/Kelurahan	
5	2021	Kab. Pati	9	Desa Dukuhsети
			10	Desa Klakahkasian
6	2021	Kab. Grobogan	11	Desa Dapurno
			12	Desa Kuwaron
7	2021	Kab. Demak	13	Desa Bungo
			14	Desa Ngaluran
8	2021	Kab. Tegal	15	Desa Tuwel
9	2021	Kab. Banyumas	16	Desa Gununglurah
			17	Desa Petarangan
10	2021	Kota Salatiga	18	Kelurahan Kumpulrejo
			19	Kelurahan Kutowinangun
11	2022	Kab. Kudus	20	Desa Krandon
			21	Kelurahan Panjunan
12	2022	Kab. Jepara	22	Desa Bugo
			23	Desa Watuaji
13	2022	Kab. Rembang	24	Desa Balongmulyo
			25	Desa Karasgede
14	2022	Kota Tegal	26	Kelurahan Panggung
15	2022	Kab. Pekalongan	27	Desa Mulyorejo
			28	Desa Wonoyoso



Tabel 33 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman TW IV 2022

Indikator	Target TWIV	Target 2022	Realisasi			Capaian TWIV	Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TWIV		
19 Jumlah desa pangan aman	28	28	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n	-	-	28	100

Dikarenakan seluruh tahapan kegiatan program desa pangan aman dapat diwujudkan pada 28 desa/kelurahan di TW IV tahun 2022. Dengan terpenuhinya 28 desa/kelurahan intervensi desa pangan aman maka dapat disimpulkan bahwa prosentase capaian kinerja jumlah desa pangan aman sampai dengan TW IV tahun 2022 sebesar 100,00 %. Capaian ini memenuhi target yang diharapkan sebesar 100,00%. Maka dari itu, capaian TW IV untuk indikator jumlah desa pangan aman termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi** sehingga dapat disimpulkan **Efektif**.

Adapun tahapan program desa pangan aman yang telah terlaksana yaitu :

- Advokasi Lintas Sektor terhadap 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota
- Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa terhadap 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota.
- Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan terhadap 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota.
- Fasilitasi Keamanan Pangan terhadap 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota.
- Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan terhadap 9 desa/kelurahan di 5 Kabupaten/Kota.
- Pengawasan terhadap 19 desa/kelurahan di 10 Kota/Kabupaten.
- Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman terhadap 9 desa/kelurahan di 5 kabupaten/kota.
- Penyusunan proposal dan profil lomba desa pangan aman

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Koordinasi dan komunikasi dengan pihak desa/kelurahan dan lintas sektor terkait efektif dan berjalan dengan baik.
- Komitmen yang tinggi dari pihak desa/kelurahan dalam mengimplementasikan kegiatan desa pangan aman.
- Dukungan besar dari lintas sektor terkait khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Pukesmas setempat.



- Agenda pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik.
- Metode sosialisasi pelaksanaan program Desa Pangan Aman dilakukan secara luring melalui metode tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- Desa/ kelurahan memiliki kader keamanan pangan yang aktif
- Desa/kelurahan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri baik dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.
- Adanya sinergitas antara program Desa Pangan Aman dengan kegiatan ketahanan pangan di Kota/Kabupaten yang menjadi lokus kegiatan program Desa Pangan Aman.

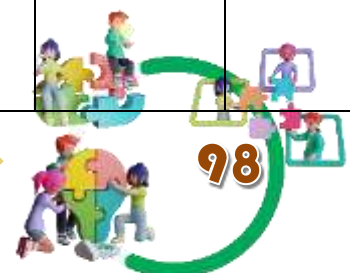
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Koordinasi dan komunikasi dengan pihak desa dan lintas sektor terkait berjalan dengan baik, serta didukung juga dengan komitmen yang tinggi dari lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan kegiatan ini.
- Metode sosialisasi pelaksanaan program Desa Pangan Aman dapat dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- Pelaksanaan tahapan kegiatan riil sesuai dengan target agenda yang direncanakan.
- Penyegaran pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah melalui tahapan pengawalan
- Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan berupa buku, poster, permainan edukasl, flipchart dan flashdisk berisi materi-materi dan video tentang keamanan pangan yang dapat digunakan oleh kader keamanan pangan desa sebagai referensi dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan desa

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pelaksanaan tahapan kegiatan direncanakan dengan matang	Membuat agenda/ perencanaan pelaksanaan kegiatan tahapan program desa pangan aman di awal tahun maupun di awal triwulan tahun berjalan		



2	Pelaksanaan tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana	<ul style="list-style-type: none"> - Menggalang komitmen petugas dalam melaksanakan kegiatan yang sudah dilaksanakan - Melaksanakan tahapan lanjutan program desa pangan aman sesuai agenda perencanaan dan sesuai timeline 		
3	Komitmen dan konsistensi melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan /rencana aksi kegiatan program desa pangan aman yang telah disusun di awal tahun	Komitmen petugas dalam melaksanakan kegiatan yang sudah disusun awal tahun didukung dengan penyusunan SKP (Satuan Kinerja Pegawai) Petugas		



4	Komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program desa pangan aman agar program berjalan lancar dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Menggalang komitmen pihak internal (petugas BBPOM di Semarang) dan eksternal (pihak desa dan linsek) untuk bergerak bersama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan program desa pangan aman seperti melakukan kegiatan kunjungan /fasilitasi sarana bersama-sama - Memotivasi kader untuk bergerak aktif dengan cara memberikan Paket Edukasi Keamanan Pangan berupa buku, poster, permainan edukasi, flipchart dan flashdisk berisi materi-materi dan video tentang keamanan pangan yang dapat digunakan oleh kader keamanan pangan desa sebagai referensi dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan desa 		
5	Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor terkait kelanjutan tahapan program desa pangan aman	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor terkait kelanjutan tahapan program desa pangan aman melalui telepon dan whatsapp atau whatsapp grup, dan pertemuan <i>zoom meeting</i>. - Menjalin komunikasi dan rajin menghubungi koordinator dan kader keamanan pangan desa yang aktif 	-	



6	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Desa Pangan Aman dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi program desa pangan aman meliputi bimbingan teknis kader dan bimbingan teknis komunitas secara langsung (tatap muka) - Melaksanakan pertemuan monev desa pangan aman secara luring/tatap muka 		
7	Sinergitas antara Program Desa Pangan Aman dengan Program Keamanan Pangan Lintas Sektor Terkait yang sudah terlaksana di Kota/Kabupaten yang menjadi lokus kegiatan program desa pangan aman.	<p>Mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan program desa pangan aman dengan program ketahanan contohnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bimtek Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa disinergikan dengan kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka perizinan SPPIRT dan laik higiene dan sanitasi - Fasilitasi disinergikan Inspeksi kesehatan lingkungan yang dilakukan oleh Sanitarian Puskesmas atau Penyuluh Keamanan Pangan Dinas Kesehatan - Fasilitasi Komunitas Masyarakat desa dilaksanakan secara mandiri oleh kader dengan pendampingan sanitarian Puskesmas 		
8	Pemberian Stikerisasi "Tidak Menggunakan Bahan Kimia Berbahaya" terhadap tempat pengolahan pangan (IRTP dan Rumah Makan)	Dilakukan pemberian stikerisasi " Tidak Menggunakan Bahan Kimia Berbahaya" terhadap tempat pengolahan pangan (IRTP dan Rumah Makan) berkoordinasi dengan sanitarian Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat		



IKK.5.4 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pada tahun 2022 telah dilakukan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Advokasi Lintas Sektor
Advokasi Lintas Sektor bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor /pemangku kepentingan di daerah.
- 2) Survey Pasar
Survei dan identifikasi kondisi pasar, dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang dibantu pengelola pasar.
- 3) Bimbingan Teknis Petugas Pasar
Pelatihan terhadap petugas pasar agar dapat mendeteksi pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, dapat melakukan pengambilan sampel, dan dapat melakukan pengujian dengan menggunakan rapid tes kit uji bahan berbahaya (formalin, boraks, methanyl yellow, rhodamin B).
- 4) Monitoring dan Evaluasi tahap I dan tahap II
Pelaksanaan sampling dan pengujian kimia yang dilakukan oleh petugas pasar dan pengujian mikrobiologi yang dilakukan oleh petugas BBPOM Di Semarang dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan. Hasil uji diinformasikan kepada pedagang sekaligus dilakukan pembinaan dan dilaporkan ke Badan POM.
- 5) Penyuluhan pedagang pasar
Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan kepada pedagang pasar tentang Bahan Berbahaya dalam Pangan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang.
- 6) Kampanye Pasar
Kampanye yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Semarang dalam bentuk pameran, pemberian leaflet/brosur, dan pemberian informasi melalui radio pasar.
- 7) Lomba Pasar
Untuk menumbuhkan dan mendorong semangat kreativitas, partisipasi



komunitas pasar dalam mengambil peran lebih besar demi mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas serta memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah dalam meningkatkan prestasi dan kinerjanya demi mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, maka diselenggarakan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

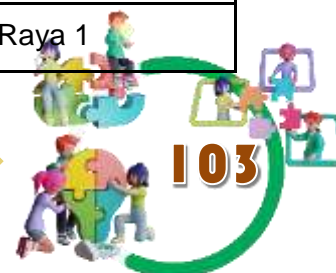
Indikator keluaran dari program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah terlaksananya program kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan total target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang harus diintervensi oleh BBPOM di Semarang.

Pasar yang diintervensi meliputi 6 (enam) pasar baru yang belum pernah diintervensi dan 10 (sepuluh) pasar lama untuk pengawalan. Seluruh tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas telah diselesaikan pada akhir TW IV tahun 2022.

Realisasi kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada TW IV tahun 2022 mencapai 16 pasar dengan capaian kinerja sebesar 100,00%. Realisasi ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada TW IV sehingga capaian terhadap target sebesar 100,00% dengan kriteria telah **Memenuhi Ekspektasi**, berarti dapat disimpulkan **Efektif**.

Daftar Pasar yang selesai diintervensi tahun 2022:

No	Tahun Intervensi	Kabupaten /Kota	Nama Pasar	
1	2020	Kab. Pemalang	1	Pasar Banjardawa
2	2020	Kab. Brebes	2	Pasar Ketanggungan
3	2020	Kab. Klaten	3	Pasar Tanjung
4	2021	Kab. Tegal	4	Pasar Pepedan
5	2021	Kab. Demak	5	Pasar Bintoro
6	2021	Kab. Grobogan	6	Pasar Purwodadi
7	2021	Kab. Blora	7	Pasar Sidomakmur
8	2021	Kab. Pati	8	Pasar Puri Baru
9	2021	Kota Salatiga	9	Pasar Raya 1



No	Tahun Intervensi	Kabupaten /Kota	Nama Pasar	
10	2021	Kab. Banyumas	10	pasar Sokaraja
11	2022	Kab. Pekalongan	11	Pasar Wonopringgo
12	2022	Kab. Jepara	12	Pasar Jepara 1
			13	Pasar Mayong
13	2022	Kab. Kudus	14	Pasar Bitingan
14	2022	Kab. Rembang	15	Pasar Rembang kota
15	2022	Kota Tegal	16	Pasar Pagi

Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas TW IV 2022

Indikator	Target TWIV	Target 2022	Realisasi					Capaian TWIV	Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TWIV				
20 Jumlah pasar aman berbasis Komunitas	16	16	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n	-		-	16	100	100

Semua tahapan kegiatan di Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sudah terlaksana pada akhir TW IV meliputi pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor, Survei Pasar, Bimtek Petugas/Pengelola Pasar, Sampling dan Pengujian Tahap 1, Penyuluhan dan Kampanye, Monitoring dan evaluasi tahap 1 dan 2, serta pengawalan terhadap Pasar yang diintervensi tahun lalu.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait di setiap tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Metode pelaksanaan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini.
- Pelaksanaan tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

- Partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan CRPB di pasar rakyat
- Dukungan serta komitmen penuh dari lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan program pasar pangan aman berbasis komunitas
- Pelaksanaan tahapan kegiatan riil sesuai dengan target agenda yang direncanakan.
- Tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas dilaksanakan dengan metode yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini
- Kegiatan kampanye dan penyuluhan kepada pedagang pasar, dilaksanakan dalam waktu/hari yang sama, untuk efisiensi tenaga dan waktu sehingga target bisa tercapai dan realisasi lebih cepat

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Komitmen atau dukungan dari pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan program pasar pangan aman berbasis komunitas.	Menggalang komitmen dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program pasar aman dengan cara melaksanakan kegiatan penyuluhan dan kunjungan bersama ke pedagang pasar		
2	Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait di setiap tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas.	Melakukan koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak pasar dan lintas sektor terkait kelanjutan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas melalui telepon dan whatsapp.		-



3	Pelaksanaan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas terjadwal	Membuat rencana aksi pelaksanaan tahapan program pasar aman berbasis komunitas di awal tahun dan dilaksanakan sesuai rencana		
4	Pelaksanaan tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana	Tahapan lanjutan program pasar pangan aman berbasis komunitas dilaksanakan sesuai agenda perencanaan		

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.2.6 *Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang*

Tabel 35 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Desember	Realisasi	Capaian TWIV 2022	Kriteria
6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
NPS					100,00	Memenuhi Ekspektasi

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022

BBPOM di Semarang





Gambar 15 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK6

IKK.6.1 Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan TW IV 2022 realisasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100,00% jika dibandingkan dengan target 100,00%, maka capaian sampai dengan Triwulan II adalah 100,00% (kategori memenuhi ekspektasi).

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW IV 2022

Indikator	Target TWIV	Target 2022	Realisasi				Capaian TWIV	Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TWIV			
21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	-	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n	-	100	100

Indikator ini tersusun dari 2 komponen yaitu:

- a) perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan



- b) perbandingan jumlah sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.
- c) Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan timeline yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk obat yang disampling meliputi produk obat, rokok, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan produk kosmetik. Pelaksanaan sampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak atau targeted mampu memberikan gambaran yang representatif terhadap peredaran produk obat yang ada dimasyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa.

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk obat dan makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat.

Sampai dengan TW IV ini capaian indikator sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 100,00%.

Analisis penyebab keberhasilan dalam peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan, yaitu :

1. Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.
2. Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
3. Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan
4. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.
5. Pemberian Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik secara konsisten termasuk terkait penandaan produk.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id.
7. Penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.



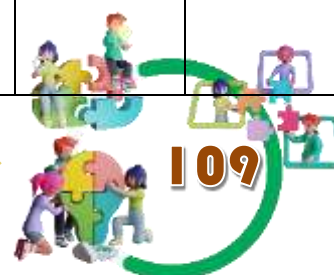
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian dan pemeriksaan.
2. Konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017
3. Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan asrot.pom.go.id dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.	Memelihara dan meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pemeriksaan.		
2	Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.	Konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017		
3	Ketaatan laboratorium dalam melaksanakan pengujian sesuai pedoman sampling yang telah ditentukan	Monitoring kesesuaian parameter uji dan acuan pustaka prosedur uji dengan pedoman sampling		



4	Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.	Monitoring kesesuaian parameter uji dan acuan pustaka prosedur uji dengan pedoman sampling Monitoring konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017		
5	Pemberian Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik secara konsisten termasuk terkait penandaan produk.	Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan asrot.pom.go.id dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.		
6	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id.			
7	Penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.			

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya



IKK.6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan TW IV Tahun 2022 realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100 % jika dibandingkan dengan target TW IV (100%), maka capaian sampai dengan TW IV adalah 100% sehingga termasuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi (kategori Efektif).

Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 (100 %), maka realisasi TW IV ini sudah mencapai target atau memenuhi ekspektasi.

Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 37 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW IV 2022

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi					Capaian TW IV	Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut		TW IV		
22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	-	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n	-	100	100	100

Pada sampel makanan, maka Indikator ini juga tersusun dari 2 komponen yaitu:

- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa (dipa Balai) sesuai ketentuan dengan jumlah target sampel setahun, dan
- Perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji (Balai+loka) sesuai standart dengan jumlah target sampel setahun.

c) Nilai dari indikator ini merupakan rata-rata dari komponen penyusunnya. Definisi pengujian memenuhi standar adalah memenuhi pedoman sampling dan *timeline* yang diatur dalam SOP. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label.

Produk makanan yang disampling berdasarkan risiko dan dilakukan sesuai pedoman sampling. Pelaksanaan sampling juga meliputi distribusi jenis dan kategori sampel di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan sampling yang dilakukan secara acak, sehingga mampu memberikan gambaran yang *representatif* terhadap peredaran produk makanan yang ada di masyarakat karena pada saat sampling dapat dilakukan terhadap produk tanpa izin edar, produk rusak dan produk kedaluarsa. Sedangkan sampling *purposed/targeted* ditujukan pada sampel-sampel yang mendapat perhatian khusus, seperti PJAS, pangan wajib SNI (garam beryodium, tepung terigu, AMDK dan minyak goreng) dan pengawasan terhadap produk Halal

Sampel kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah produk makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium menjadi dasar menetapkan apakah produk tersebut memenuhi syarat pada sampel *purposed/targeted*, sedangkan pada sampling



acak penentuan TMS selain berdasarkan hasil uji, juga berdasarkan penilaian penandaan.

Pada TW IV ini capaian hasil sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi. Capaian TW IV naik sebesar 16.99% dibandingkan pada TW III. Keberhasilan pencapaian kinerja antara lain disebabkan oleh kedisiplinan semua pihak baik dalam menepati ketentuan dan standar pengujian yang telah ditetapkan. Disamping itu adanya monitoring dan pengawasan yang melekat dari atasan juga memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan pencapaian kinerja TW IV ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain :

1. Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.
2. Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
3. Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan
4. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.
5. Pemberian Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik secara konsisten termasuk terkait penandaan produk.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder.
7. Penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

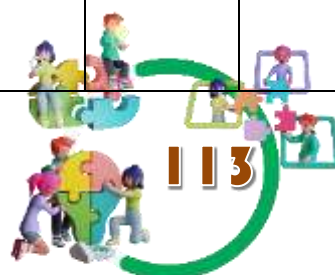
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Pelatihan teknis pengujian dan bimbingan teknis yang secara kontinyu dilakukan untuk personil-personil pengujian dan pemeriksaan.
2. Laboratorium pengujian pangan secara aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian dengan mengikuti uji profisiensi, kolaborasi metode dan melaksanakan verifikasi metode Analisa.
3. Meningkatkan pemenuhan standart alat laboratorium yang terkalibrasi.
4. Konsisten dalam penerapan Sistem Mutu ISO /IEC 17025:2017
5. Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.	Pelatihan teknis pengujian dan bimbingan teknis yang secara kontinyu dilakukan untuk personil-personil pengujian dan pemeriksaan.	-	-
	Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.	Laboratorium pengujian pangan secara aktif melakukan kegiatan untuk menjaga mutu pengujian dengan mengikuti uji profisiensi, kolaborasi metode dan melaksanakan verifikasi metode Analisa.	-	-
	Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan	Meningkatnya pemenuhan standart alat laboratorium yang terkalibrasi.		
	Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.	Konsisten dalam penerapan Sistem Mutu ISO /IEC 17025:2017		
	Pemberian Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik secara konsisten termasuk terkait penandaan produk.	Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.		
	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam			



	melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id.			
	Penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile maupun website resmi_ www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.			

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.2.7 Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tabel 38 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Desember	Realisasi	Capaian TWIV 2022	Kriteria
7 Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75	75	91,50	122,00	Tidak Dapat Disimpulkan
NPS					122,00	Tidak Dapat Disimpulkan



Gambar 16 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK7

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022

BBPOM di Semarang



IKK.7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut- turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian/ target perkara})$$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Pada TW IV tahun 2022, realisasi perkara SPDP sebanyak 0 perkara, P21

sebanyak 2 perkara, dan tahap I sebanyak 2 perkara dan tahap II sebanyak 6 perkara. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang TW IV tahun 2022 yaitu 91.5%, jika dibandingkan dengan target TW IV sebesar 75%, maka capaian sampai dengan TW IV adalah 122% sehingga TIDAK DAPAT DISIMPULKAN.

Tabel 39 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW IV 2022

Indikator	Target TWIV	Target 2022	Realisasi				Capaian TWIV	Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TWIV			
23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75	75	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,	-	-	91,50	122,00	122,00

Beberapa hal penyebab keberhasilan penindakan mampu melampaui target dengan kesimpulan TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, antara lain :

- Bahwa setiap minggu ada rapat monitoring capaian kinerja, termasuk di dalamnya pembahasan tentang target sasaran, serta proses atau progres pemberkasan, dengan tujuan mengawal capaian persentase penindakan, meskipun demikian, proses pemberkasan yang sifatnya “uncontroable”, berpengaruh terhadap capaian keberhasilan penindakan. Terutama untuk berkas carry over yang sudah melalui proses lebih lanjut dan selesai di tahun 2022 cukup banyak, selain itu, ada berkas perkara yang baru saja berproses, tiba-tiba mendapatkan P21 di akhir tahun, hal ini mempengaruhi persentase keberhasilan penindakan.
- Substansi penindakan memiliki strategi koordinasi lebih dini dan intens terhadap 2 (dua) institusi yang berperan penting untuk keberhasilan penyelesaian proses pemberkasan (proses P21 dan Tahap II). Kedua institusi ini yaitu Kejaksaan Tinggi dan Dit. Reskrimsus Polda Jateng. Namun, untuk proses P21 pada berkas terakhir, yaitu KMD, mendapatkan P21 lebih cepat.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	-			

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya



Meski masuk dalam Kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, hal ini bukanlah menjadi masalah atau kendala, karena merupakan proses yang di luar kendali dari Substansi Penindakan.

Adanya temuan dari inspektorat terhadap penanganan barang bukti, membuat Substansi Penindakan mencoba mencari formula yang tepat untuk penanganan Barang Bukti. Penanganan Barang Bukti ini mempunyai pengaruh dalam kualitas kegiatan Serah Tahap II, juga telah melakukan sosialisasi kembali mengenai Tata Kelola Barang Bukti dan berkoordinasi dengan Rupbasan Semarang.

Pada TW IV ini juga, Substansi Penindakan **berhasil mengadakan pertemuan Lintas Sektor dalam Rangka Sinergisitas Aparat Penegak Hukum (Criminal Justice System)**, yaitu dengan instansi Polda Jawa Tengah (Korwas PPNS), Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Rupbasan Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah. Ini juga menunjukkan salah satu faktor penyebab pencapaian kinerja dari Substansi Penindakan, namun ternyata ada proses yang berjalan lebih cepat dari kesepakatan dalam kegiatan Sinergisitas.

Upaya-upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan ataupun memperbaiki capaian kinerja di atas adalah:

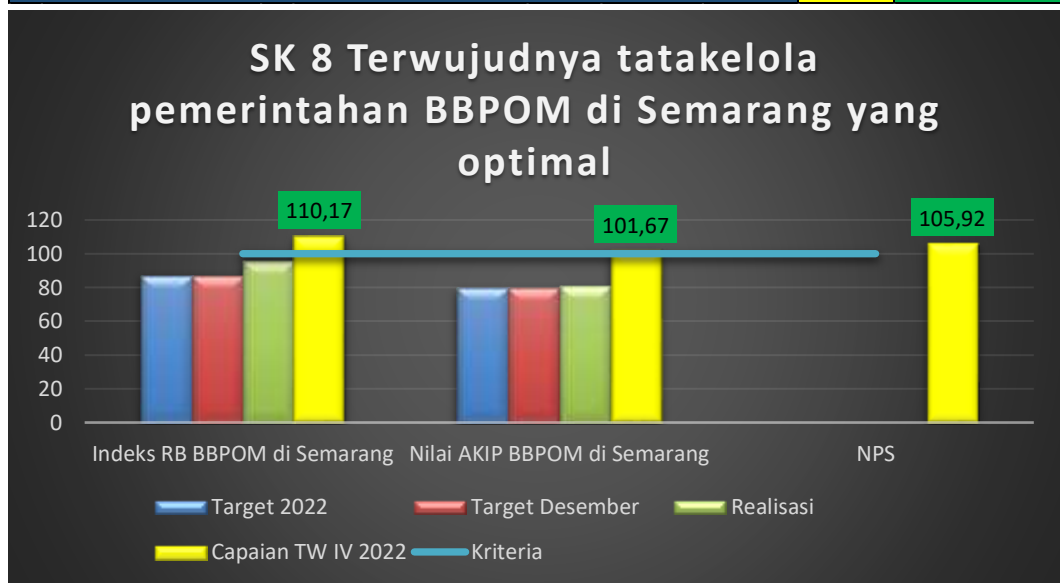
1. Pemantauan Monitoring dan Evaluasi yang lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan koordinasi informal maupun informal dengan lintas sektor agar keseluruhan proses kerja Penindakan dapat berjalan lebih lancar dan lebih cepat.
3. Meningkatkan kapasitas kemampuan dan kesejahteraan Petugas / Penyidik melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung.
4. Mengelola laporan masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi, sehingga tindak lanjut yang dilakukan bisa memberikan hasil maksimal.
5. Pengelolaan Barang Bukti yang lebih baik dan mampu telusur.
6. Pembagian tugas per direktorat, agar lebih cepat dan terukur.



3.2.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal

Tabel 40 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Desember	Realisasi	Capaian TW IV 2022	Kriteria
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal	24 Indeks RB BBPOM di Semarang	87	87	95,85	110,17	Memenuhi Ekspektasi
	25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang	79,5	79,5	80,825	101,67	Memenuhi Ekspektasi
NPS					105,92	Memenuhi Ekspektasi



Gambar 17 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK8

IKK.8.1 Indeks RB BBPOM di Semarang

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, 81 penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan



BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM:

Pengungkit sebesar 60%

1. Manajemen Perubahan: bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM berpredikat menuju WBK/WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pembangunan Zona Integritas BBPOM di Semarang adalah:

- a) Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas.
- b) Melengkapi unsur-unsur Zona Integritas pada unsur pengungkit.
- c) Melakukan survey terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi
- d) Melakukan survey integritas jabatan dan survey integritas organisasi
- e) Membuat inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi
- f) Melaksanakan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat
- g) Melakukan internalisasi
- h) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

Tabel 41 Capaian Indikator Kinerja Indeks RB BBPOM di Semarang TW IV

Indikator	Target TWIV	Target 2022	Realisasi			Capaian TWIV	Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TWIV		
24 Indeks RB BBPOM di Semarang	87	87	Hasil indeks RB dari Ittama	-	-	95,85	110,17

Jika dibandingkan Tahun 2021 Realisasi capaian Indeks RB Balai Besar POM di Semarang Tahun 2022 adalah 95,85 atau 110,17%

Adapun Realisasi Capaian Indeks RB tahun 2022 terjadi peningkatan dari 99,97% di tahun 2021 menjadi 110,17% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022

BBPOM di Semarang



Pada TW IV Tahun 2022 telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung percepatan implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Semarang, antara lain :

implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Semarang, antara lain :

1. Mengikutsertakan semua pegawai baik ASN maupun nonASN administrasi dalam peningkatan kompetensi ASN BerAKHLAK.
2. Melakukan kegiatan studi tiru yang oleh Tim Pokja RB BBPOM di Semarang baik dengan lintas sektor maupun dengan internal Badan POM.
3. Menyelenggarakan survei opini pegawai untuk meningkatkan engagement pegawai melalui
4. Membuat inovasi yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik, yaitu: Lawangsewu, aplikasi Melon Manis, dan Sinau Online Sareng (SOS), KONDE, Lakone Sekti, Klik PATAS

IKK.8.2 Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- a) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- b) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- c) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, dilakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

- a) Aspek perencanaan (bobot 35%), komponen-komponen yang dievaluasi antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) perencanaan kinerja; (3) penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut.
- b) Aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), komponen-komponen yang dievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) I analisis hasil pengukuran kinerja.
- c) Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.
- d) Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- e) Aspek Capaian kinerja (bobot 20%), dalam hal dilakukan rliu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian target dan keandalan data.



Tabel 42 Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
>90	AA	Sangat Memuaskan
>80 – 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 – 70	B	Baik
>50 – 60	CC	Cukup Baik
>30 – 50	C	Agak Kurang
<30	D	Kurang

Tujuan penilaian indikator ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu: perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%) dan pencapaian sasaran / kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1.

Tabel 43 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP BBPOM di Semarang TW IV

Indikator	Target TWIV	Target 2022	Realisasi			Capaian TWIV	Capaian 2022
			Pembilang	Penyebut	TWIV		
25 Nilai AKIP BBPOM di Semarang	79,5	79,5	Hasil nilai AKIP dari lttama	-	-	80,825	101,67

Pada TW IV tahun 2022 BBPOM di Semarang terealisasi 80,825 (Kategori A) dengan capaian sebesar 101,67%. Adapun Realisasi ini meningkat 1,665 poin dari 79,16 di tahun 2021.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

1. Melakukan review terhadap target secara berkala
2. Memantau Peningkatan Realisasi Setiap Tahunnya
3. Melakukan pemantauan kendala, rencana aksi, dan tindak lanjut secara berkala
4. Mengikuti Pedoman Sakip Badan POM

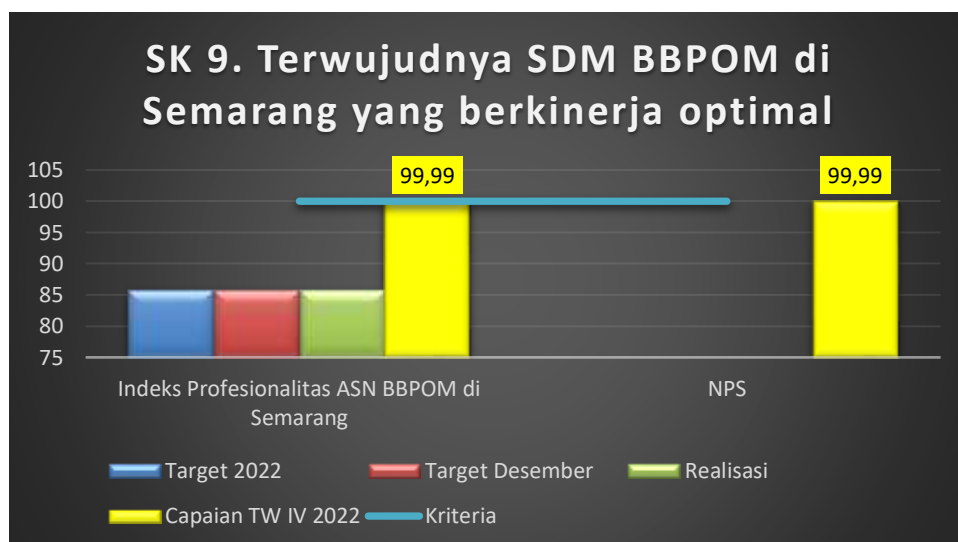
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :

1. Menciptakan Inovasi-inovasi di kelima aspek penilaian
2. Reviu Renstra secara berkala

3.2.9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal

Tabel 44 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Desember	Realisasi	Capaian TW IV 2022	Kriteria
9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	85,8	85,8	85,79	99,99	Belum Memenuhi Ekspektasi
NPS					99,99	Belum Memenuhi Ekspektasi



Gambar 18 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK9

IKK. 9.1 Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai (Bobot 25%)
- b. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan (Bobot 40%)



- c. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS (Bobot 30%)
- d. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami (5%)

Tabel 45 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang

Indikator	Target TWIV	Target 2022	Realisasi				Capaian	Capaian
			Pembilang	Penyebut	TWIV	TWIV	2022	
26 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang	85,8	85,8	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM	-	-	85,79	99,99	99,99

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM. Cara Perhitungan dan Formula: Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

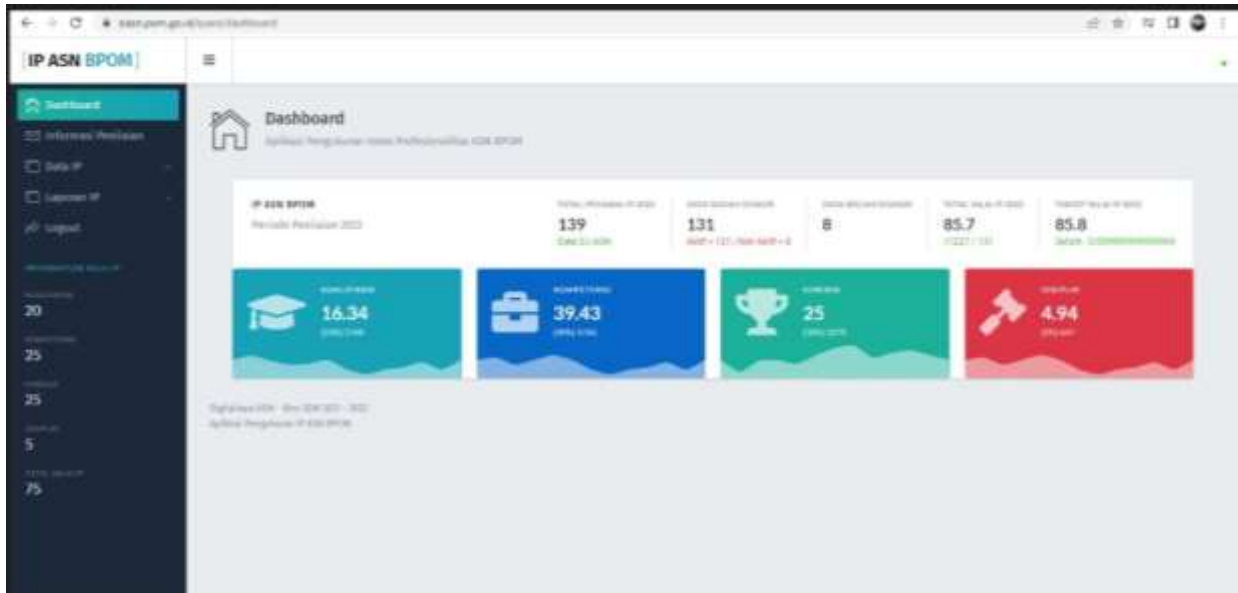
Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;

- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.



Sumber : Siasn.po.go.id

Gambar 19 Hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), yaitu :

- a. Terdapat Pegawai yang terkena hukuman ringan sebanyak 4 orang selama 2016-2021 dan nilai ini akan terakumulasi sampai dengan akhir tahun Renstra 2024
- b. Beberapa Pegawai yang masih dalam proses Tugas Belajar atau Ijin Belajar S1.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja di atas adalah:

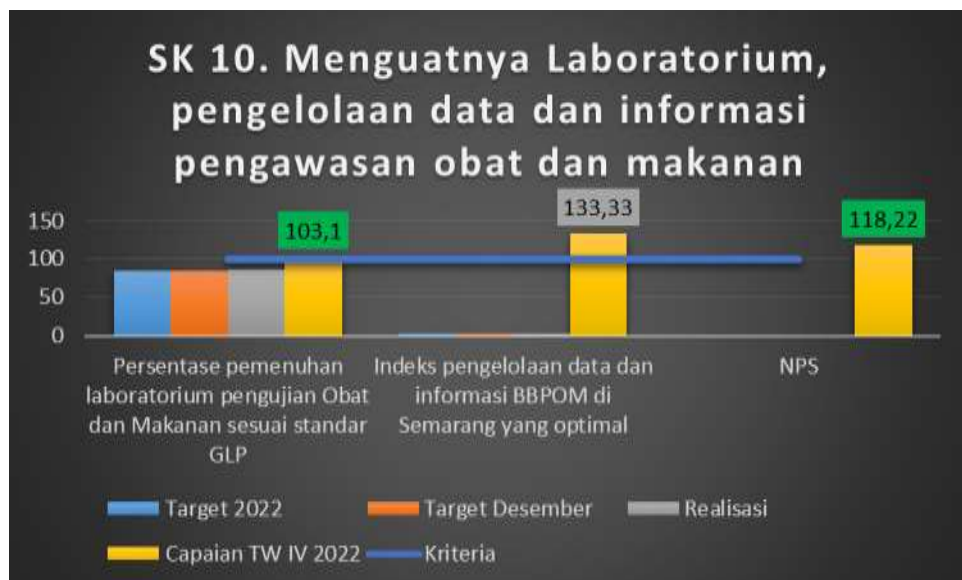
- a. Melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan untuk setiap pegawai minimal 20 JP/tahun
- b. Melakukan desiminasi pelatihan, sosialisasi dan webinar.
- c. Meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk pegawai yang berpendidikan setingkat SMA, D3 maupun S1.
- d. Melakukan bimbingan pegawai untuk mencapai nilai SKP yang baik
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan peraturan kepegawaian



3.2.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 46 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Desember	Realisasi	Capaian TW IV 2022	Kriteria
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	84	86,6	103,1	Memenuhi Ekspektasi
	28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,25	2,25	3	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
NPS					118,22	Memenuhi Ekspektasi



Gambar 20 Grafik Capaian Indikator- Indikator pada SK10

IKK.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Adapun cara perhitungannya

diperoleh berdasarkan nilai assesmen yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN).

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Sampai dengan TW IV ini capaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP telah memenuhi ekspektasi yang ditetapkan, yaitu 103,1%.

Analisis penyebab keberhasilan dalam peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan, yaitu :

1. Personil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas selalu mengacu pada standar Pedoman Sampling dan Pengujian yang telah ditetapkan.
2. Kompetensi laboratorium dalam melakukan uji sesuai standar. Kompetensi laboratorium meliputi kompetensi personel, metode analisa yang telah diverifikasi, peralatan laboratorium yang dikalibrasi, dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017.
3. Ketaatan laboratorium dalam menaati pedoman sampling yang telah ditentukan
4. Monitoring dan pengawasan melekat dari atasan dalam pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan.
5. Pemberian Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dalam mengimplementasi Cara Produksi/ Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik secara konsisten termasuk terkait penandaan produk.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id.
7. Penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile maupun website resmi www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

1. Memelihara dan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara kontinyu kepada personel pengujian dan pemeriksaan.
2. Konsistensi penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017
3. Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan asrot.pom.go.id dalam melakukan pemeriksaan penandaan serta penggunaan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile atau website www.pom.go.id untuk melakukan pengecekan nomor izin edar produk.



Tabel 64 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP TW IV 2022

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi				Capaian TW IV	Capaian 2022	
			Pembilang	Penyebut	TW IV				
27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	84	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	-		-	86,6	103,1	103,1

IKK.10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG yang optimal

Sampai dengan TW IV 2022 realisasi Indeks Pengelolaan data dan informasi adalah 3 % jika dibandingkan dengan target 2,25%, maka capaian sampai dengan TW IV adalah 133,33% (kriteria Tidak dapat disimpulkan). Rincian capaian indikator kinerja “Indeks Pengelolaan data dan informasi” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 47 Capaian Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi TW IV 2022

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi				Capaian TW IV	Capaian 2022	
			Pembilang	Penyebut	TW IV				
28 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Semarang yang optimal	2,25	2,25	hasil assesment oleh Pusdatin	-		-	3	133,33	133,33

Komponen pengelolaan data dan informasi BBPOM DI SEMARANG mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC, Indeks ini diperoleh dari :
 - a. Data SPIMKER
Diperoleh dari data kasus keracunan yang dlerifikasi dibandingkan dengan data kasus keracunan yang diinput oleh Rumah Sakit dalam aplikasi Spimker.
 - b. Data SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu)
Diperoleh dari data yang diinput baik dari hasil pemeriksaan sarana maupun hasil pengujian.
2. Indeks pemanfaatan system InformasiBPOM
 - a. Jumlah upload berita actual setiapbulan
Berita yang diupload adalah kegiatan yang melibatkan stake holder eksternal seperti KIE, Bimtek, Talkshow, Workshop dan sebagainya.
 - b. Pemanfaatan sharing folder untuk kegiatan pengawasan

dan penyuluhan.

- c. Dashboard di BOC melihat penggunaannya dari aspek Login dan Pemanfaatannya.
- d. Email dengan ketentuan akun email yang aktif adalah dilihat dari *traffic* pengiriman dan penerimaan email.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- a. Berkoordinasi dengan Pusat untuk penggunaan aplikasi SIPT sehingga dapat mengirimkan hasil pengujian dan pemeriksaan sarana tepat waktu
- b. Mempertahankan Koordinasi dengan Rumah sakit untuk aktif melaporkan data keracunan melalui SPIMKER
- c. Meningkatkan penggunaan *email corporate* dalam melakukan pengiriman dokumen secara elektronik ke Pusat maupun stakeholder.
- d. Penggunaan BOC setiap hari dan dimanfaatkan secara optimal
- e. Tetap konsisten dalam pembuatan berita aktual di subsite BBPOM di Semarang
- f. Mempertahankan penggunaan *sharing folder* di setiap kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a. Penggunaan Email Corporate untuk sharing link Zoom Apel setiap Senin dan Kamis
- b. Monitoring seluruh komponen pemanfaatan dan pemutahiran Sistem Informasi Setiap Bulan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline

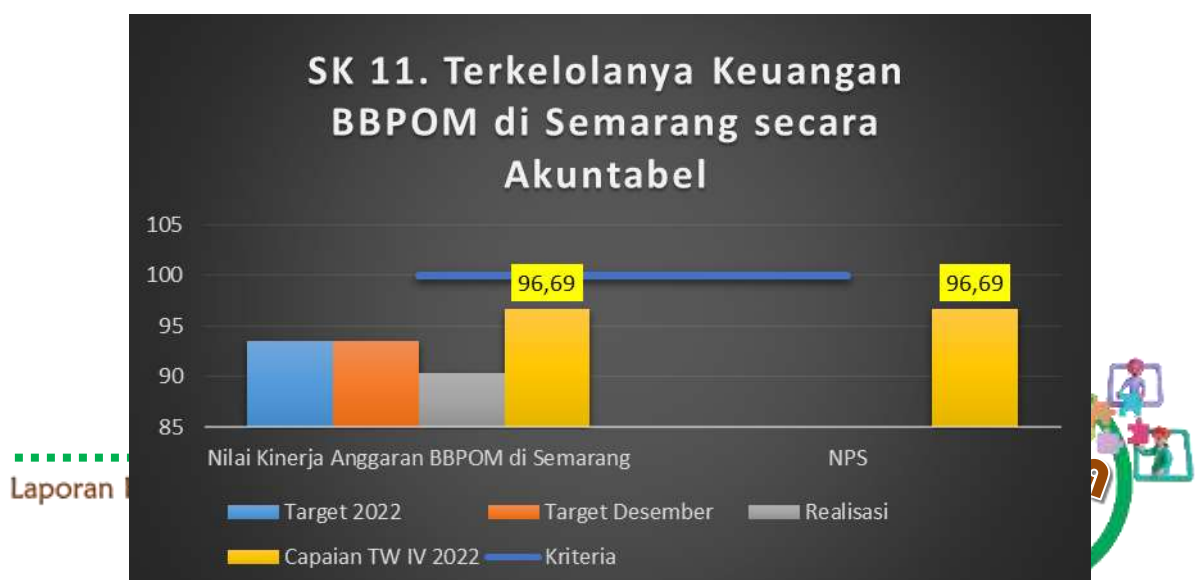


1	SIPT belum berjalan maksimal, ada beberapa data yang belum terintegrasi antara SIPT dengan BOC	Komunikasi intensif. Hasil uji terkirim ke Ka Balai / Balai dan Berkoordinasi dengan Pusat untuk penggunaan aplikasi SIPT sehingga dapat mengirimkan hasil pengujian dan pemeriksaan sarana tepat waktu		
2	Sampai dengan TW IV masih terdapat 10 email corporate tidak aktif	Monev dan mengupayakan email corporate yang tidak aktif agar dapat aktif dan digunakan serta koordinasi dengan Pusdatin.		

3.2.11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel

Tabel 48 NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Desember	Realisasi	Capaian TW IV 2022	Kriteria
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	93,5	93,5	90,41	96,69	Belum Memenuhi Ekspektasi
NPS					96,69	Belum Memenuhi Ekspektasi



IKK.11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/BBPOM DI SEMARANG yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Pada Triwulan IV NKA dengan target 93,5 terealisasi 90,41 dengan capaian 96,69 (kriteria Belum memenuhi ekspektasi).

Tabel 49 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

Indikator	Target TW IV	Target 2022	Realisasi					Capaian TW IV	Capaian 2022
			Pembilang		Penyebut				
29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	93,5	93,5	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	-		-	90,41	96,69	96,69

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Reformulasi IKPA 2022 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Adapun perubahan aspek dan indikator kinerja serta tatacara penilaian adalah sebagai berikut:

a. Perubahan aspek dan indikator kinerja:

IKPA 2021	IKPA 2022
-----------	-----------



4 Aspek 1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran (15%) 2. Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran (28%) 3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%) 4. Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (10%)	3 Aspek 1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
IKPA 2021 13 Indikator Kinerja: 1. Revisi DIPA (5%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (5%) 3. Pagu Minus (5%) 4. Data Kontrak (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (8%) 6. LPJ Bendahara (5%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Penyerapan Anggaran (15%) 9. Capaian Output (17%) 10. Penyelesaian Tagihan (10%) 11. Retur SP2D (5%) 12. Pengembalian SPM (5%) 13. Perencanaan Kas (5%)	IKPA 2022 8 Indikator Kinerja: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3. Data Kontrak (10%) 4. Penyelesaian Tagihan (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 6. Dispensasi SPM (5%) 7. Penyerapan Anggaran (20%) 8. Capaian Output (25%)

Untuk perhitungan nilai kinerja anggaran pada TW IV tahun 2022 digunakan nilai IKPA 97,12.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Periode: Desember

No	Kode APBN	Kode BA	Kode Subur	Uraian Subur	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Komposisi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Target/Komposisi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	134	003	432702	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	Nilai	100,00	77,21	99,48	100,00	99,08	99,89	100,00	100,00			
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	7,72	19,70	10,00	9,91	9,90	5,00	25,00			
					Nilai Aspek					99,11			100,00			

Sumber: spanint.kemenkeu.go.id

Gambar 22 Nilai IKPA di Omspan

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Semarang TW IV tahun 2022 sebesar 86,59.



Sumber : smart.kemenkeu.go.id

Gambar 23 Nilai EKA di Smart DJA

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- a. Beberapa Kegiatan tidak berjalan sesuai POA, tetapi berusaha untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
- b. Meningkatkan Capaian Output Kegiatan BBPOM di Semarang
- c. Meminimalisir Koreksi SPM
- d. Meminimalisir Revisi Anggaran
- e. Optimalisasi Penyelesaian Tagihan dan pengelolaan UP dan TUP
- f. Konsistensi waktu pelunasan belanja kontraktual

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

- a. Penyusunan POA teliti dan realistis dan mematuhi apa yang sudah di rencanakan
- b. Meminimalisir revisi DIPA dan Memaksimalkan revisi POK
- c. PPK secara berkala memantau Realisasi dan Capaian Output
- d. Meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Semarang

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), adalah:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai *	Belum**
			Rencana Aksi



1	Meningkatkan nilai Nilai IKPA	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA • Meminimalisir revisi DIPA dan Memaksimalkan revisi POK • PPK secara berkala memantau Realisasi dan Capaian Output • Meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Semarang 		
---	-------------------------------	--	--	--

Mereview target triwulan berikutnya dan upaya untuk meningkatkan nilai IKPA maupun EKA.

- a. Untuk meningkatkan nilai Nilai IKPA:
 - Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
 - Meminimalisir revisi DIPA dan Memaksimalkan revisi POK
 - PPK secara berkala memantau Realisasi dan Capaian Output
 - Meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Semarang
- b. Untuk meningkatkan nilai EKA :
 - Melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran
 - Meningkatkan capaian output kegiatan.

3.3 Realisasi anggaran

Akuntabilitas keuangan BBPOM di Semarang TW III Tahun 2022 telah dilaporkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW III Tahun 2022, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 56.702.377.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan setelah ada automatic adjustment dan relokasi anggaran KIE ke BBPOM di Bandung pada bulan Mei 2022 maka jumlah anggaran BBPOM di Semarang pada TW II sebesar Rp. 55.272.377.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu



Rupiah). Pada Bulan Agustus untuk pemenuhan kebutuhan belanja Pegawai sampai dengan akhir tahun dengan pembukaan Automatic Adjustmen Sebesar Rp 672.850.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Penambahan Sebesar Rp1.089.218.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Sembilan juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), dan adanya penambahan Anggaran KIE pada Bulan September Sebesar Rp. 540.720.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), serta pengurangan Automatic Adjustmen sebesar Rp. 3.693.272.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). Maka pagu dipa menjadi Rp. 52.668.323.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Pada TW IV tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 52.603.755.839,- (Lima Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau 99,88% telah mencapai target 90%.

Tabel 50 Realisasi Anggaran TW IV Tahun 2022

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Fisik				Anggaran		
		Volume	Satuan	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)	Pagu setelah Automatic Adjustment tahap 2 (Rp)	Realisasi (Kumulatif)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/cx100)	g	h	i=(h/gx100)
'063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan			6625		26.483.243.000	26.438.581.475	99,83%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			6625		26.483.243.000	26.438.581.475	99,83%
3165.AEA	Koordinasi	14	Kegiatan	14	100,00%	175.490.000	175.466.409	99,99%
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4464	Layanan	5387	120,68%	1.063.054.000	1.058.724.601	99,59%
3165.BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	40	UMKM	40	100,00%	150.268.000	150.108.965	99,89%
3165.BKB	Pemantauan produk	1	Laporan	1	100,00%	1.139.717.000	1.134.411.346	99,53%
3165.BMB	Komunikasi Publik	60	Layanan	61	101,67%	124.000.000	124.000.000	100,00%
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	Paket	1	100,00%	384.932.000	384.364.283	99,85%
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Paket	1	100,00%	136.536.000	136.389.100	99,89%
3165.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan	1	Unit	1	100,00%	75.000.000	74.920.907	99,89%
3165.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	1	100,00%	868.279.000	866.678.604	99,82%
3165.PDD	Standarisasi Lembaga	1	Lembaga	1	100,00%	3.203.090.000	3.202.039.239	99,97%
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	10	perkara	10	70,31%	861.455.000	861.396.899	99,99%
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	123	Lembaga	131	106,50%	1.965.709.000	1.964.902.337	99,96%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	79	Sekolah	87	110,13%	619.375.000	619.164.799	99,97%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	28	Desa	28	100,00%	986.767.000	986.243.468	99,95%
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	16	Pasar	16	100,00%	359.567.000	359.494.070	99,98%
3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	19600	Orang	21535	109,87%	7.811.880.000	7.790.163.982	99,72%
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3449	Sampel	4164	120,73%	2.206.632.000	2.204.285.787	99,89%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	909	Sampel	1548	170,30%	575.438.000	575.144.928	99,95%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Supler	2186	Sampel	2480	113,45%	1.523.232.000	1.521.323.242	99,87%
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	134	Sampel	136	101,49%	107.962.000	107.817.617	99,87%
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1395	Lembaga	1506	107,96%	1.993.140.000	1.987.065.410	99,70%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa o	385	Sarana	393	102,08%	538.374.000	538.147.540	99,96%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, S	1010	Sarana	1113	110,20%	1.454.766.000	1.448.917.870	99,60%
3165.RAB	Sarana Bidang Kesehatan			1	0,00%	4.324.061.000	4.323.663.606	99,99%
'063.01.WA	Program Dukungan Manajemen					26.185.080.000	26.165.174.364	99,92%
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM					26.185.080.000	26.165.174.364	99,92%
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	1	100,00%	26.185.080.000	26.165.174.364	99,92%
	TOTAL	29162		32856	112,67%	52.668.323.000	52.603.755.839	99,88%

Sumber : Data yang diolah



Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala dengan melaksanakan rapat progresif bulanan money realisasi anggaran setiap hari senin minggu ke 2.
- b) Mengoptimalkan sisa anggaran kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dengan melakukan revisi DIPA atau POK.
- c) Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- d) Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19.
- e) Percepatan pengadaan barang dan jasa.

3.4 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut

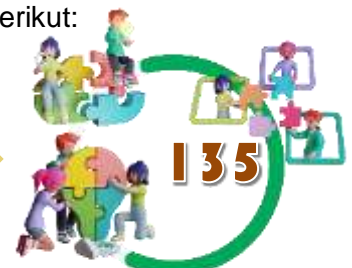
Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Nilai efisiensi Sasaran Kegiatan diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap Sasaran Kegiatan dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien) | 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien) |
| 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien) | 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien) |
| 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien) | 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien) |
| 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien) | 9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien) |
| 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien) | 10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien) |

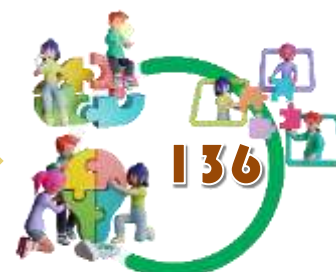
Tabel 51 Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja TW IV Tahun 2022

No	Indikator	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		%	%				
1	Persentase Obat yang memenuhi	95,86%	99,87%	0,96	-0,04	75%	Tidak Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	112,38%	99,95%	1,12	0,12	100%	Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan	86,98%	99,87%	0,87	-0,13	75%	Tidak Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan	99,57%	99,95%	1,00	0,00	100%	Efisien
5	Persentase pangan fortifikasi yang	87,46%	99,87%	0,88	-0,12	75%	Tidak Efisien
6	Indeks kesadaran masyarakat	101,09%	100,00%	1,01	0,01	100%	Efisien
7	Indeks kepuasan pelaku usaha	107,14%	99,83%	1,07	0,07	100%	Efisien
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang	104,05%	99,45%	1,05	0,05	100%	Efisien
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di BBPOM di Semarang	103,49%	99,53%	1,04	0,04	100%	Efisien
10	Persentase keputusan/rekomendasi	109,89%	99,82%	1,10	0,10	100%	Efisien
11	Persentase keputusan/rekomendasi	109,58%	99,82%	1,10	0,10	100%	Efisien
12	Persentase keputusan penilaian	100,48%	99,74%	1,01	0,01	100%	Efisien
13	Persentase sarana produksi Obat dan	103,70%	99,96%	1,04	0,04	100%	Efisien
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi	100,73%	99,43%	1,01	0,01	100%	Efisien
15	Indeks Pelayanan Publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang	104,49%	99,53%	1,05	0,05	75%	Efisien
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	112,56%	99,89%	1,13	0,13	100%	Efisien
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan	100,41%	99,72%	1,01	0,01	100%	Efisien
18	Jumlah sekolah dengan Pangan	110,13%	99,97%	1,10	0,10	100%	Efisien
19	Jumlah desa pangan aman	100,00%	99,95%	1,00	0,00	100%	Efisien
20	Jumlah pasar aman berbasis	100,00%	99,98%	1,00	0,00	100%	Efisien
21	Persentase sampel Obat yang	100,00%	99,87%	1,00	0,00	100%	Efisien
22	Persentase sampel makanan yang	100,00%	99,94%	1,00	0,00	100%	Efisien
23	Persentase keberhasilan penindakan	122,67%	99,99%	1,23	0,23	95%	Efisien
24	Indeks RB Balai Besar POM di Semarang	110,17%	99,91%	1,10	0,10	100%	Efisien
25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Semarang	101,67%	100,00%	1,02	0,02	100%	Efisien
26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Semarang	99,99%	99,90%	1,00	0,00	100%	Efisien
27	Persentase pemenuhan laboratorium	103,10%	99,98%	1,03	0,03	100%	Efisien
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Semarang yang optimal	133,33%	99,89%	1,33	0,33	95%	Efisien
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang	96,70%	99,91%	0,97	-0,03	75%	Tidak Efisien
Rata-Rata/Jumlah/Tingkat Efisiensi		104,06%	99,88%	1,04	0,04	100%	Efisien

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan Tabel di atas meski secara keseluruhan efisien tetapi beberapa indikator masih ada yang tidak efisien diantaranya :

1. Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat



2. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
3. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
4. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Semarang

Tabel 52 Pengukuran Efisiensi per Kelompok Rincian Output (KRO) TW IV Tahun 2022

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		%	%				
'063.0	Program Pengawasan Obat dan Makanan	112,66%	99,83%	1,13	0,13	100%	Efisien
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di	112,66%	99,83%	1,13	0,13	100%	Efisien
3165.A	Koordinasi	100,00%	99,99%	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.B	Pelayanan Publik Lainnya	120,68%	99,59%	1,21	0,21	95%	Efisien
3165.B	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	100,00%	99,89%	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.B	Pemantauan produk	100,00%	99,53%	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.B	Komunikasi Publik	101,67%	100,00%	1,02	0,02	100%	Efisien
3165.C	Sarana Bidang Kesehatan	100,00%	99,85%	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.C	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	100,00%	99,89%	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.C	Prasarana Bidang Kesehatan	100,00%	99,89%	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.C	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00%	99,82%	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.F	Standarisasi Lembaga	100,00%	99,97%	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.F	Perkara Hukum Badan Usaha	100,00%	99,99%	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.F	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	106,50%	99,96%	1,07	0,07	100%	Efisien
3165.G	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah	110,13%	99,97%	1,10	0,10	100%	Efisien
3165.G	Desa Pangan Aman	100,00%	99,95%	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.G	Pasar aman dari bahan berbahaya	100,00%	99,98%	1,00	0,00	100%	Efisien
3165.G	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	109,87%	99,72%	1,10	0,10	100%	Efisien
3165.G	Pengawasan dan Pengendalian Produk	120,73%	99,89%	1,21	0,21	100%	Efisien
3165.G	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh	170,30%	99,95%	1,70	0,70	90%	Efisien
3165.G	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik	113,45%	99,87%	1,14	0,14	100%	Efisien
3165.G	Sampel pangan fortifikasi yang di perik	101,49%	99,87%	1,02	0,02	100%	Efisien
3165.G	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	107,96%	99,70%	1,08	0,08	100%	Efisien
3165.G	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang	102,08%	99,96%	1,02	0,02	100%	Efisien
3165.G	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional	110,20%	99,60%	1,11	0,11	100%	Efisien
3165.F	Sarana Bidang Kesehatan	100,00%	99,99%	1,00	0,00	100%	Efisien
'063.0	Program Dukungan Manajemen	100,00%	99,92%	1,00	0,00	100%	Efisien
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	100,00%	99,92%	1,00	0,00	100%	Efisien
6384.B	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00%	99,92%	1,00	0,00	100%	Efisien
	Rata-Rata/Jumlah/Tingkat Efisiensi	106,33%	99,88%	1,06	0,06	100%	Efisien

Sumber : Data yang diolah

Sedangkan Efisiensi berdasarkan KRO untuk Seluruh KRO, BBPOM Semarang berhasil mengifisienkan seluruh output jauh di atas anggarannya.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- a. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi
- b. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
- c. Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D
- d. Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19



Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

Capaian Kinerja diukur dari 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada TW IV Tahun 2022 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada TW IV Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 53 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sebelas Sasaran Kegiatan yang diukur pada TW IV Tahun 2022

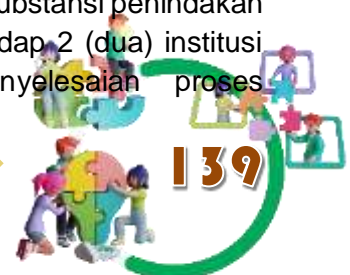
No	Perspektif	Sasaran Strategis	NPSS	NP Perspektif
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	96,45	100,81
2		Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	101,09	
3		Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	104,89	
4	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	105,92	107,14
5		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	102,64	
6		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	100,00	
7		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	122,00	
8	Learning and Growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	105,92	104,01
9		Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	101,55	
10		Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	111,55	
11		Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	97,02	
			NPS	103,99
			Kriteria	Memenuhi Ekspektasi



Dari hasil NPS sebesar 103,99% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, terjadi peningkatan 1,54 poin dari TW III meski naik tetapi selama 2022 masih ditemukan cukup banyak produk obat (Kosmetik) dan Pangan fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Untuk hasil Ketiga Nilai Pencapaian Perspektif telah memenuhi ekspektasi semua dengan nilai capaian di atas 100%. Lebih mendetail lagi Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

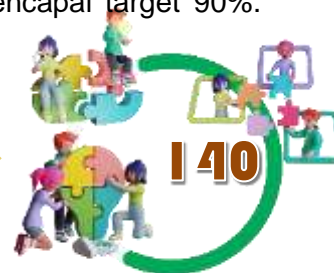
1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 96,45% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang belum berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Jawa Tengah pada Triwulan IV tahun 2022
2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kedua sebesar 101,09% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan BBPOM di Semarang berhasil Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Semarang
3. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Ketiga sebesar 104,89% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang telah Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Semarang
4. Capaian indikator Sasaran Kegiatan keempat sebesar 105,92% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan BBPOM di Semarang berhasil dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Semarang
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 102,64% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, BBPOM di Semarang berhasil dalam meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
6. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang.
7. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 122,00% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, hal ini dikarenakan Substansi penindakan memiliki strategi koordinasi lebih dini dan intens terhadap 2 (dua) institusi yang berperan penting untuk keberhasilan penyelesaian proses



pemberkasan (proses P21 dan Tahap II). Kedua institusi ini yaitu Kejaksaan Tinggi dan Dit. Reskrimsus Polda Jateng. Namun, untuk proses P21 pada berkas terakhir, yaitu KMD, mendapatkan P21 lebih cepat.

8. Capaian indikator Sasaran kegiatan kedelapan sebesar 105,92% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi", hal ini menunjukkan BBPOM di Semarang mewujudkan tatakelola pemerintahan yang optimal
9. Capaian indikator Sasaran kegiatan kedelapan sebesar 101,55% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi", hal ini menunjukkan BBPOM di Semarang mewujudkan SDM yang berkinerja optimal
10. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesepuluh sebesar 113.87% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi", menunjukkan BBPOM di Semarang telah berhasil meningkatkan penguatan laboratorium, pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
11. Capaian indikator Sasaran Kegiatan kesebelas sebesar 97,02% dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi", menunjukkan BBPOM di Semarang belum berhasil dalam mengelola keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel.

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Daerah Jawa Tengah TW III Tahun 2022, Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 56.702.377.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan setelah ada automatic adjustment dan relokasi anggaran KIE ke BBPOM di Bandung pada bulan Mei 2022 maka jumlah anggaran BBPOM di Semarang pada TW II sebesar Rp. 55.272.377.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada Bulan Agustus untuk pemenuhan kebutuhan belanja Pegawai sampai dengan akhir tahun dengan pembukaan Automatic Adjustmen Sebesar Rp 672.850.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Penambahan Sebesar Rp1.089.218.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Sembilan juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), dan adanya penambahan Anggaran KIE pada Bulan September Sebesar Rp. 540.720.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), serta pengurangan Automatic Adjustmen sebesar Rp. 3.693.272.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). Maka pagu dipa menjadi Rp. 52.668.323.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Pada TW IV tahun 2022 terealisasikan sebesar Rp 52.603.755.839,- (Lima Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau 99,88% telah mencapai target 90%.



4.2 Saran

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja BBPOM di Semarang adalah :

- a) Monitoring Capaian Kinerja secara berkala
- b) Konsistensi dalam penyusunan POA setiap triwulan dan saat revisi anggaran
- c) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa
- d) Monitoring penggunaan anggaran dan capaian output secara berkala.



Lampiran

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022

BBPOM di Semarang





KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR PR.04.01.13A.12.21.4604 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

- Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2022.
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SEMARANG



(DRA. SANDRA M.P. LINTHIN, APT., M.KES)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

NOMOR PR.04.01.13A.12.21.4604 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SEMARANG TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SEMARANG TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,4
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,2

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,16
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,2
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Indeks Pelayanan Publik	4,35
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	79
		Jumlah desa pangan aman	28
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	16
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87
		Nilai AKIP UPT	79,5
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,8
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. 024 - 7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633
Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,5

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SEMARANG



(DRA. SANDRA M.P. LINTHIN, APT., M.KES)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Semarang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Semarang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.4
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88.2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72.16
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.2
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.45

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	79
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	28
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	16
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	79.5

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.8
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.5

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
56,702,377,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Semarang, 16 Desember 2021
Pihak Pertama



Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes.

No.	Kendatikan Semarang	Tahapan												Revisi	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okta	Nov	Des		
28.	Indeks pengelompokan data dan informasi UPT yang optimal			1,38	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	137.736.000,00
29.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	10	12	13	15	16	15	16	17	17	18	18	18,1	27.456.000.000,00	
Total														56.782.277.889,00	

Semarang, 11 Agustus 2022

Kepala Balai Besar POM di Semarang

Dr. Sandra M.P. Luthin, Apt., M.Kes.

Lampiran 4. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Semarang

No	Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja			Kriteria	NPSS	NP Perspektif
				Desember					
				Target	Realisasi	%Capaian			
1.	stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	87.23	95.86	Belum Memenuhi	96.45	100.81
2.			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	92.15	112.38	Memenuhi Ekspektasi		
3.			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.4	77.76	86.98	Belum Memenuhi Ekspektasi		
4.			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	78.66	99.57	Belum Memenuhi Ekspektasi		
5.			Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95	83.09	87.46	Belum Memenuhi Ekspektasi		
6.		Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78	78.85	101.09	Memenuhi Ekspektasi	101.09	
7.		Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88.2	94.5	107.14	Memenuhi Ekspektasi	104.89	
8.			Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72.16	75.08	104.05	Memenuhi Ekspektasi		
9.			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91	94.18	103.49	Memenuhi Ekspektasi		

No	Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja			Kriteria	NPSS	NP Perspektif
				Desember					
				Target	Realisasi	%Capaian			
10.	internal_process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	100	109.89	Memenuhi Ekspektasi	105.92	107.14
11.			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80	87.66	109.58	Memenuhi Ekspektasi		
12.			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.2	99.68	100.48	Memenuhi Ekspektasi		
13.			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53	54.96	103.7	Memenuhi Ekspektasi		
14.			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71.52	100.73	Memenuhi Ekspektasi		
15.			Indeks Pelayanan Publik UPT	4.45	4.65	104.49	Memenuhi Ekspektasi		
16.			Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik	77	86.67	112.56	Memenuhi Ekspektasi		
17.			Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93	93.38	100.41		
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	79		87	110.13	Memenuhi Ekspektasi			
19.	Jumlah desa pangan aman	28		28	100	Memenuhi Ekspektasi			
20.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	16		16	100	Memenuhi Ekspektasi			
21.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi	100.00		
22.		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi			
23.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75	91.5	122.00	Tidak Dapat Disimpulkan	120.00		

No	Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja			Kriteria	NPSS	NP Perspektif
				Desember					
				Target	Realisasi	%Capaian			
24.	learning_and_growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87	95.85	110.17	Memenuhi Ekspektasi	105.92	104.01
25.			Nilai AKIP UPT	79.5	80.83	101.67	Memenuhi Ekspektasi		
26.		Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.8	85.79	99.99	Belum Memenuhi Ekspektasi	101.55	
27.		Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar	84	86.6	103.1	Memenuhi Ekspektasi	111.55	
28.			Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	3	133.33	Tidak Dapat Disimpulkan		
29.		Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.5	90.71	97.02	Belum Memenuhi Ekspektasi	97.02	
								NPS	103.99
								Kriteria	Memenuhi Ekspektasi

Balai Besar POM di Semarang

Jl. Sukun Raya No. 41A Banyumanik Semarang 50264

Telp. 024-7612324/Fax. 024-7613633



likpomsm@yahoo.com



[@bpom.semarang](https://www.instagram.com/bpom.semarang)



www.pom.go.id



[@bpom.semarang](https://www.twitter.com/bpom.semarang)



[@bpom.semarang](https://www.facebook.com/bpom.semarang)



[@bpom.semarang](https://www.tiktok.com/@bpom.semarang)